



P E M E R I N T A H
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

RENCANA STRATEGIS Tahun 2019 – 2023

DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Bhayangkara No. 54. Telp: (0541) 743921 / 7427745
Fax: (0541) 736228 - Samarinda, Indonesia,
E-mail: dinaspeternakankaltim@gmail.com



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;**
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;**
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran;**
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;**

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- v. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perkebunan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- z. Dinas Kehutanan;
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Sekretariat DPRD;
- dd. Badan Penghubung Provinsi;
- ee. Inspektorat;
- ff. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- kk. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ll. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, telah sesuai dengan:

- a. Sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 6

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
- b. Bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

KATA PENGANTAR

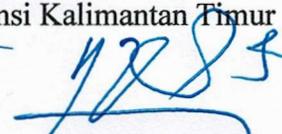
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memfasilitasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai salah satu acuan dalam merumuskan lebih lanjut langkah-langkah operasional yang terkait dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan peternakan.

Secara singkat dijelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan pembangunan peternakan yang dilengkapi dengan matriks kegiatan Tahun 2019 – 2023 yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah.

Perencanaan strategis ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan tentunya dengan dukungan semua pihak baik Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun swasta, praktisi, akademisi dan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun peternakan di wilayah Kalimantan Timur.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, tentunya melalui masukan semua pihak. Namun demikian diharapkan renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan stakeholder, pemerintah, pelaku usaha dan lembaga lainnya. Semoga Bermanfaat.

Samarinda, April 2019
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur


Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19601004 198703 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR LAMPIRAN	Iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	10
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	39
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	45
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.....	54
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Aspek Kinerja dari SDG's	61
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	66
BAB IV. TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	71
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.....	71

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
	4.1. Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	82
	4.2. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	82
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	86
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	97
BAB VIII.	PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	21
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	22
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan	23
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	25
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	38
Tabel 2.6	Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	41
Tabel 2.7	Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	42
Tabel 2.8	Struktur Konsumsi Susu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	43
Tabel 2.9	Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	44
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	45
Tabel 3.2	Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	47
Tabel 3.3	Produksi Hasil Ternak Daging dan Telur di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	51
Tabel 3.4	Produksi Daging Sapi di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017 (ton)	52
Tabel 3.5	Konsumsi Hasil Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017 (Ton)	52
Tabel 3.6	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	55
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	57
Tabel 3.8	Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	57

Tabel 3.9	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	59
Tabel 3.10	Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	59
Tabel 3.11	Matriks TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	66
Tabel 3.12	Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	69
Tabel 4.1	Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	73
Tabel 4.2	Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	74
Tabel 4.3	Perkembangan harga komoditas ternak dan produk ternak tahun 2013-2017	75
Tabel 4.4	PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)	75
Tabel 4.5	Kontribusi PDRB Peternakan terhadap Perekonomian Prov Kaltim atas dasar harga berlaku Tahun 2013-2017 (%)	76
Tabel 4.6	Kontribusi PDRB Subsektor peternakan terhadap PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku Tahun 2013-2017 (%)	76
Tabel 4.7	Target PDRB Subsektor Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam persen)	77
Tabel 4.8	Target Produksi Daging di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)	78
Tabel 4.9	Target Produksi Telur di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)	79
Tabel 4.10	NTP Peternakan dan NTP Gabungan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	80
Tabel 4.11	Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	80
Tabel 4.12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	84

Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim	90
Tabel 6.2	Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim	93
Tabel 6.3	Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim	95
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah daratan menjadi 129.066,64 km² (49.832,91mil²). Jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar 3.501.232 jiwa dengan kepadatan 25,93 jiwa/km², rata-rata pertumbuhan penduduk 3,60%/tahun. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kaltim juga tidak merata, porsi terbesar berada di Samarinda (23,66%), selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (20,99%), Balikpapan (17,88%), Kutai Timur (9,5%) dan tersebar di Kabupaten/Kota lain berkisar \pm 5%. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan komoditas ternak seperti daging, telur dan susu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kaltim adalah sektor pertambangan dan penggalian, namun kondisi ini tidak lagi semenjak terjadinya penurunan harga komoditas pertambangan diantaranya batubara dan minyak bumi. Data PBRD Kaltim tahun 2017 sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar 23,36%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya 0,46% menjadi 5,7%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, peternakan serta tanaman pangan dan hortikultura. Sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,38% namun jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan produk unggulan adalah daging ayam. Sedangkan ketersediaan lokal di Kalimantan Timur baru mencapai daging 79% dan telur 61%.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga mencapai 0,37%, dimana salah satu harga komoditas yang mempengaruhi inflasi adalah perkembangan **harga daging sapi dan harga daging ayam broiler**. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk mengukur

tingkat kesejahteraan petani setiap tahun bergerak fluktuatif namun cenderung naik yaitu sebesar 98,62 pada tahun 2018, akumulasi dari NTP Pertanian, Perkebunan, Kelautan Perikanan, Peternakan dan Kehutanan. Kondisi ini disebabkan indeks yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertaniannya jauh lebih tertinggal dibandingkan laju indeks yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya sarana produksi pertanian. NTP untuk peternakan adalah **108,82 adalah yang tertinggi** di lingkup Pertanian.

Terdapat 5 Prioritas Pembangunan Nasional sebagai penutup Kabinet Kerja yang akan diselesaikan dalam tahun 2019 meliputi : (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; **(3) PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI melalui PERTANIAN, industri dan jasa produktif; (4) Pemantapan ketahanan energi, PANGAN dan Sumber Daya Air;** serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Peran strategis pertanian untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional ke 3 dan 4 sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat yang kian meningkat pesat seiring dengan kenaikan indikator pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan kesadaran gizi masyarakat, maka Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 telah menetapkan **6 Sasaran**. Enam Sasaran kementerian pertanian tersebut meliputi **(1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;** (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) Penyediaan bahan baku industri dan bioenergi; serta **(5) Peningkatan Pendapatan keluarga petani**. Daging menjadi salah satu komoditas utama melalui program pencapaian swasembada tahun 2019 dan swasembada berkelanjutan.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu bagian dari lima komoditas strategis nasional yaitu **daging** pada dasarnya adalah :

- a) Penyediaan pangan hewani yang **Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);**
- b) Berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak seperti daging, telur dan susu;

- c) Mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.
- d) Membantu pengentasan kemiskinan melalui program “BEKERJA” atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, dengan komoditas unggulan Ayam Buras dan Kambing.

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu dan menelaah Renstra kementerian pertanian. Disamping itu juga menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu : Visi “ Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat” dan Misi kelima yaitu “ Berdaulat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan serta mewujudkan ketercukupan sandang dan papan”.

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

“Mini Ranch Sapi Potong untuk Kesejahteraan Peternak yang Berdaulat”

Pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, upaya peningkatan populasi dengan sistem “Mini Ranch” sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat, serta keunggulan lainnya

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
4. Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya secara sistematis segala usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukr hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- (1). Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- (2). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
- (3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
- (4). Undang-undang No. 18 tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84);
- (5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
- (6). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah
- (7). Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- (8). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
- (9). Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- (10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (11). Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (12). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- (13). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- (1). Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur
- (2). Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder serta masyarakat peternakan di Kalimantan Timur
- (3). Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Pembangunan Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan, yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun.
- (4). Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- (5). Renstra ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 terdiri dari 7 (tujuh) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menguraikan lingkungan intern yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja pelayanan publik sampai saat ini serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), terakhir tentang penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam waktu lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pertanian Urusan Peternakan

Bab ini menyajikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat ringkasan singkat serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program,
 - b. Kepala Sub Bagian Umum,
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan,
3. Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perbibitan Ternak
 - b. Kepala Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan
 - c. Kepala Seksi Penataan Kelembagaan dan Penyebaran Ternak
4. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan
 - c. Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Hewan
 - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

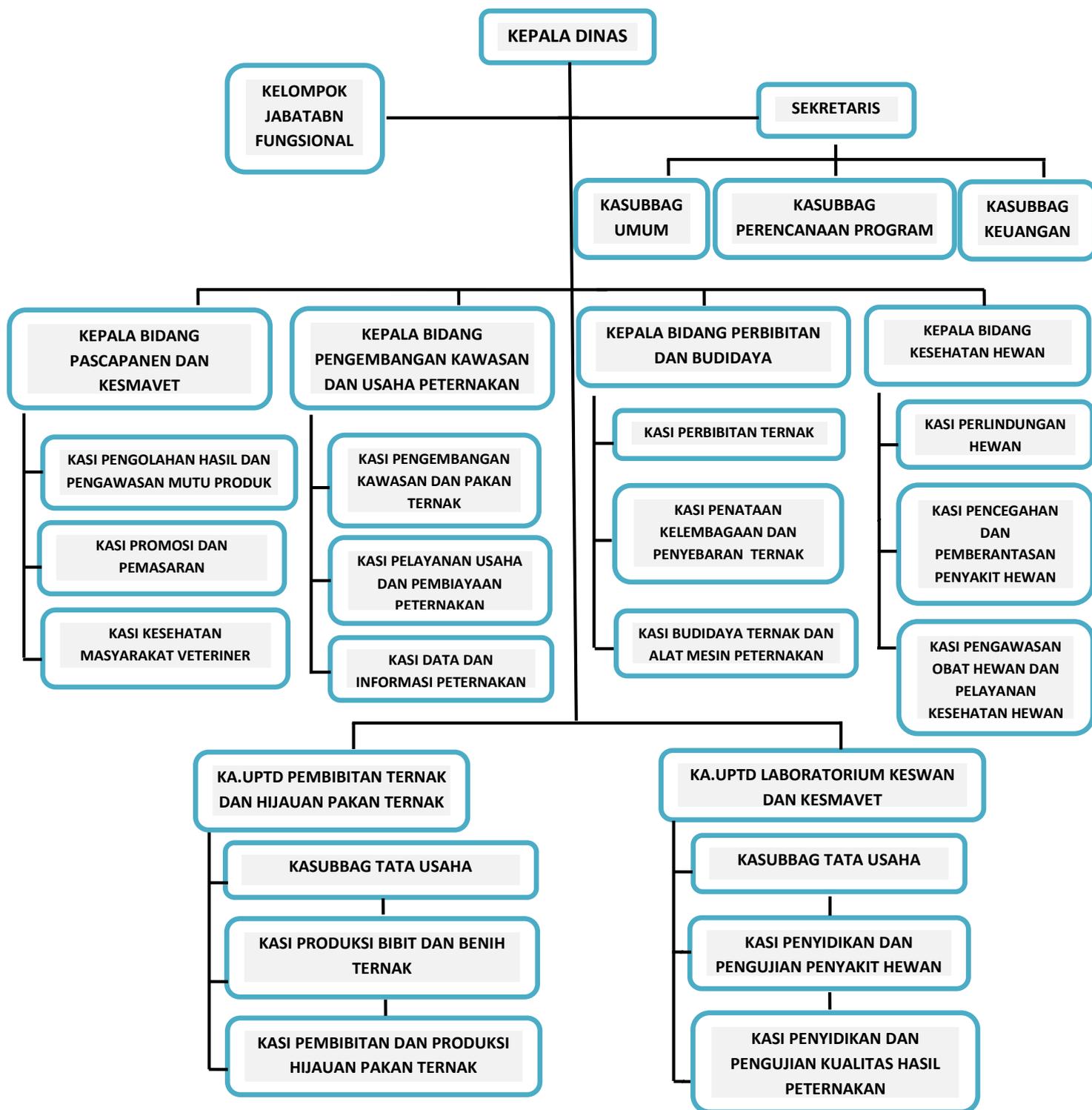
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - c. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Bagan 2.1 berikut**.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XXII PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 73 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 DESEMBER 2016
TENTANG : STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengolahan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
2. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
3. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
4. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
6. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
- d. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
- e. Kelompok Jabatan fungsional

7. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan'
 - d. Seksi penyidikan dan pengujian penyakit peternakan
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
 - f. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bgaian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala UPTD Seksi-seksi di masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior sebagai Ketua ketua kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
8. Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempuntai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi

dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 104 orang yang terdiri dari 29 orang pejabat struktural, 71 orang pelaksana, 7 orang pejabat fungsional tertentu dan 62 orang Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara.

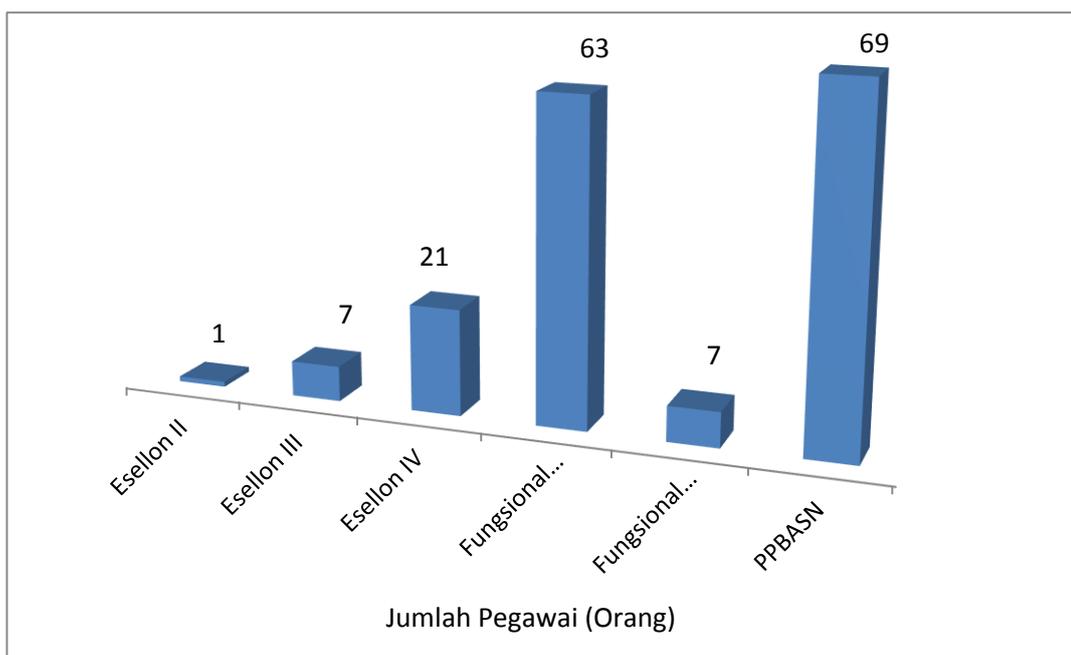
Berdasarkan pengelompokan umur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) dapat disampaikan data sebagai berikut:

1. Usia 50 tahun ke atas : 36 orang
2. Usia 40 – 50 tahun : 44 orang
3. Usia 30 - 40 tahun : 50 orang
4. Usia 20 – 30 tahun : 25 orang

Pegawai terbanyak pada kisaran usia 30 – 40 tahun sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut diatas merupakan gabungan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN).

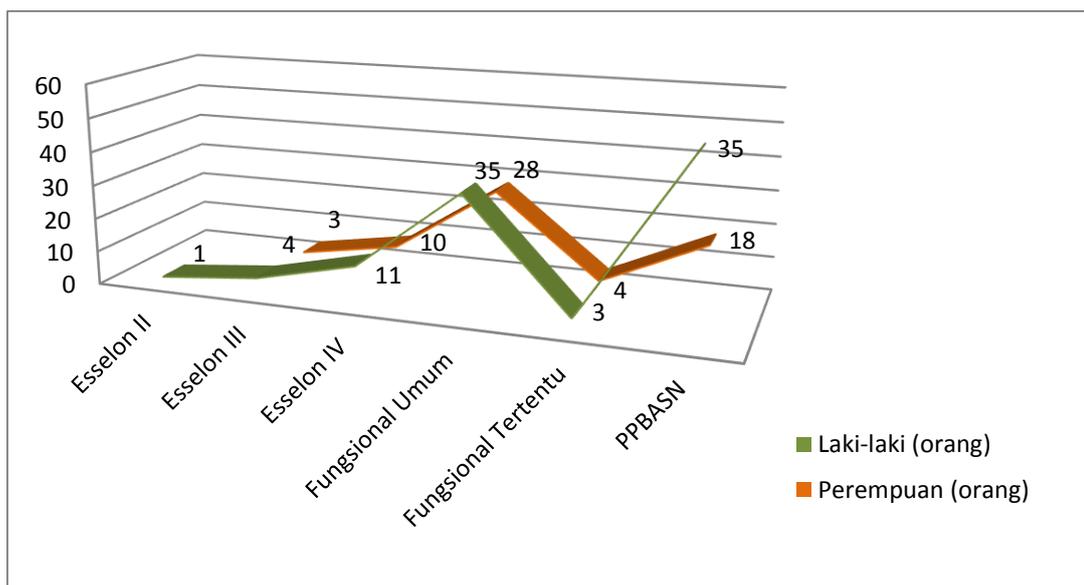
Komposisi jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) eselon II yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) eselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris; 4 (empat) Kepala Bidang; 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; 21 (dua puluh satu) eselon IV terdiri atas 5 (lima) sub bagian dan 16 (enam belas) Kepala Seksi; 63 (enam puluh tiga) Fungsional Umum; 7 (tujuh) Fungsional Tertentu; 69 (enam puluh sembilan) Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN).

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018



Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

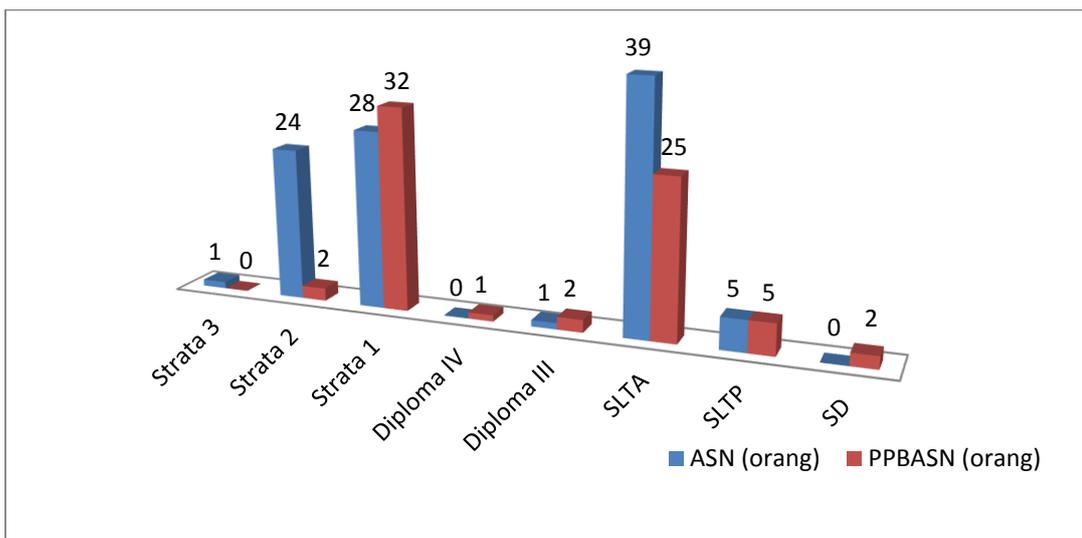
Grafik 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 2018



Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan, meliputi 1 orang Strata III, 24 orang Strata II, 28 orang Strata I, 1 orang Diploma III, 39 orang SLTA, 5 orang SLTP. Komposisi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) berdasarkan tingkat pendidikan meliputi 2 orang Strata 2, 32 orang Strata I, 1 orang Diploma IV, 2 orang Diploma III, 25 orang SLTA, 5 orang SLTP, dan 2 Orang SD .

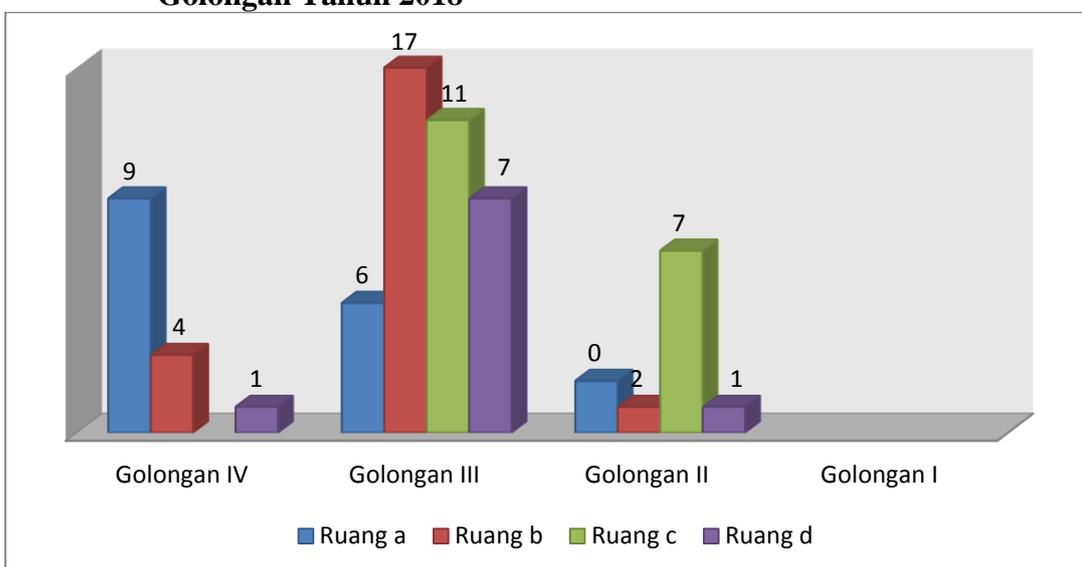
Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

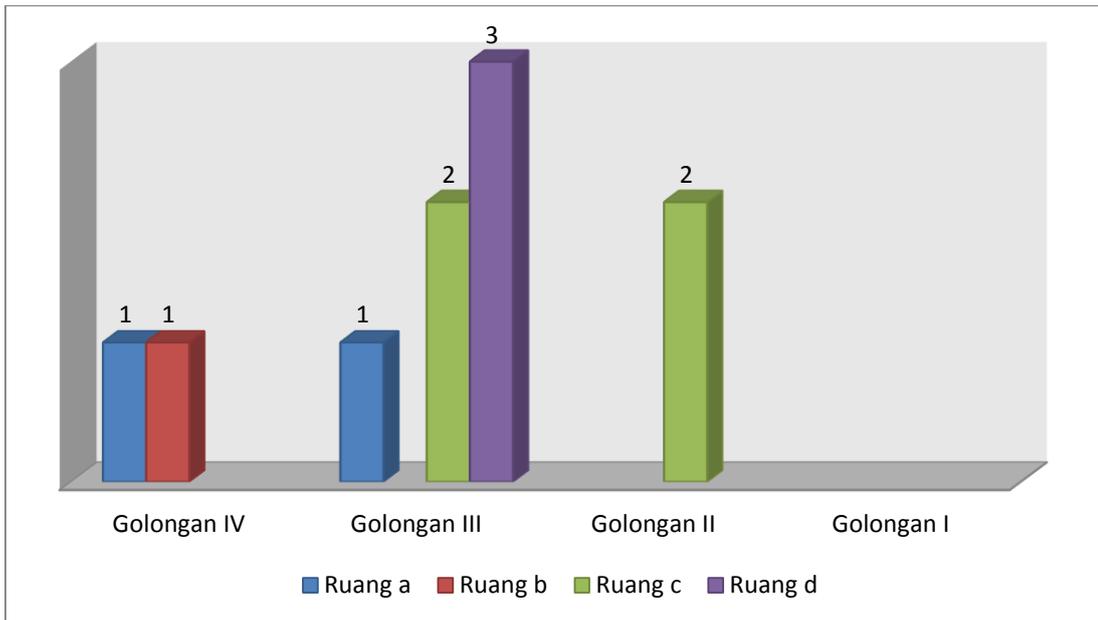
Komposisi pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan lokasi kerja, yaitu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 64 orang, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet 10 orang dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 24 orang.

Grafik 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan Golongan Tahun 2018



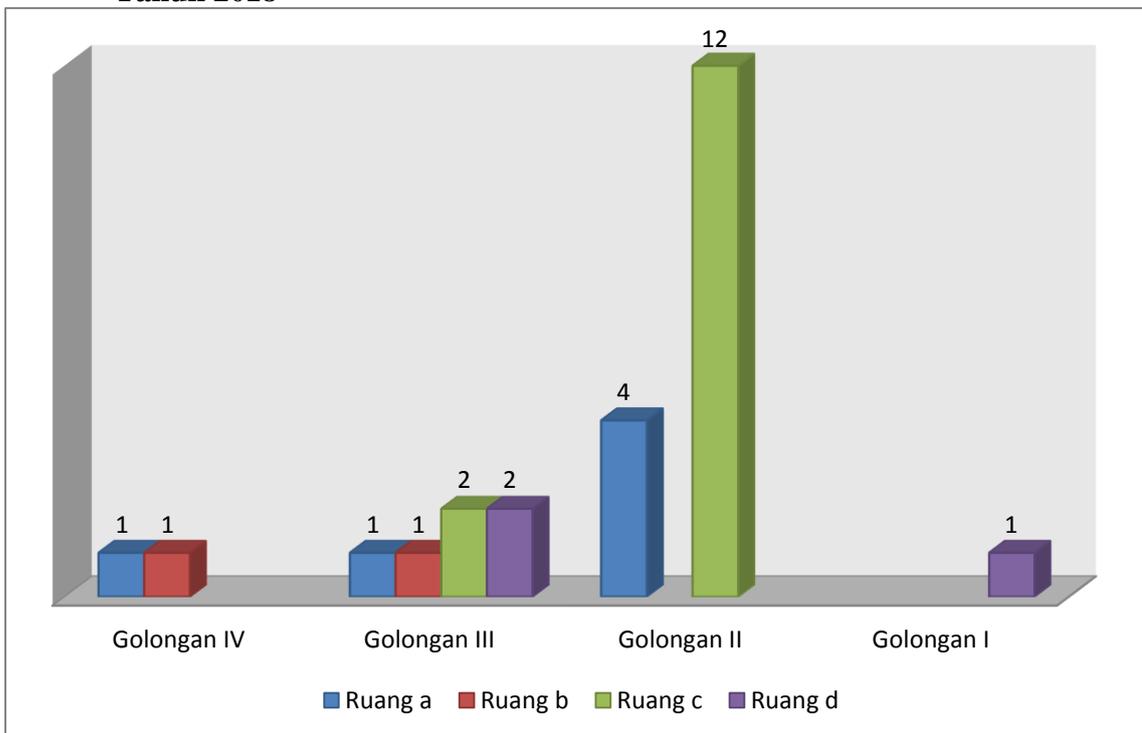
Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 2.5 Jumlah Pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Berdasarkan Golongan, Tahun 2018



Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 2.6 Jumlah Pegawai UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Tahun 2018



Sumber : SIMPEG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

B. Sumber Daya Aset atau Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.272	m ²
2	Gedung	3	Unit (2 Lantai) 2.410 m ²
3	Klinik Hewan	2	Ruang
4	Taman	800	m ²
5	Listrik	4	Jaringan
6	Air	2	Jaringan
7	Telepon	3	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	2	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	3	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Perpustakaan	1	Ruang
13	Ruang CS	1	Ruang
14	Komputer	37	Unit
15	Laptop	52	Unit
16	Ruang Obat	1	Ruang
17	Ruang Persediaan	1	Ruang
18	Ruang Pengadaan	1	Ruang
19	Mobil Dinas	7	Unit
20	Mobil operasional	11	Unit
21	Motor Dinas	40	Unit
22	Kantin	1	Buah
23	Website	1	Buah
24	Papan Pengumuman	2	Buah
25	LED Display	1	Buah

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
26	Papan iklan	2	Buah
27	Mushola	1	Unit

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	686,4	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 668 m ²
3	Laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan)	5	1 Ruangan
4	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	5	1 Ruangan
5	Listrik	168.000	KWatt
6	Air	172	m ³
7	Telepon	120	MBPS Line (Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Taman	47	m ²
12	Komputer	4	Unit
13	Laptop	12	Unit
14	Mobil Dinas	4	Unit
15	Motor Dinas	4	Unit
16	Mobil Operasional	3	Unit
17	Papan Pengumuman	1	Buah
18	Papan iklan	1	Buah
19	Incenerator	1	Unit
20	Ruang sampel	1	Ruang
21	Ruang Observasi	1	Ruang
22	Ruang Mutu	1	Ruang
23	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
24	Mushola	1	Ruang
25	Ruang Penerima sampel	1	Ruang
26	Ruang Petugas Sampel	1	Ruang
27	Ruang Pos Satpam	1	Ruang
28	Ruang Biosecurity	1	Ruang
29	Toilet	2	Ruang

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	500.000	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) m ²
3	Laboratorium Inseminasi Buatan (IB)	1	Unit
4	Mess	1	Unit
5	Listrik	15	Jaringan
6	Air	-	Jaringan
7	Telepon	-	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	-	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Kantin	1	Buah
13	Lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	38	Ha
14	Taman	1.000	m ²
15	Komputer	8	Unit
16	Laptop	4	Unit
17	Mobil Dinas	4	Unit
18	Motor Dinas	7	Unit
19	Kendaraan operasional : - Roda-6	1	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
	- Roda-4	2	Unit
	- Roda-3	1	Unit
	- Roda-3	-	Unit
	- Roda-2	7	Unit
	- Traktor	2	Unit
	- Hand Tractor	2	Unit
20	Kandang sapi	14	Buah
21	Kandang rusa	1	Buah
22	Kandang ayam	4	Buah

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2013-2018 dapat diuraikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka penjelasan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Ketersediaan Lokal Daging dan Telur

Ketersediaan lokal daging dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan 2014 ketersediaan lokal daging mencapai 100% dan 105,76% di masing-masing tahunnya. Sedangkan pada tahun 2015 ketersediaan lokal daging hanya mencapai 93,27%. Pada tahun 2016 dan 2017 ketersediaan lokal daging mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 104,6% dan 102,6% di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ketersediaan lokal daging sudah mencapai 98,75%.

Pada ketersediaan lokal telur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2013 ketersediaan lokal telur mencapai 100%. Pada tahun 2014 ketersediaan lokal telur tercapai hanya 61,50% terjadi penurunan sebesar -38.5% dibandingkan tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan ketersediaan lokal telur sebesar 76,62% dan 91,76% di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ketersediaan lokal telur sudah mencapai 77,22%.

Ketersediaan daging dan telur lokal sangat dipengaruhi oleh produktivitas ternak seperti sapi potong, ayam buras, ayam potong, kambing, dan aneka ternak lainnya. Kontribusi daging sapi baru mencapai 27,36% sehingga perlu peningkatan populasi sapi potong hingga mencapai populasi dasar 600.000 ekor untuk memenuhi seluruh kebutuhan daging sapi. Kontribusi telur lokal mencapai 61% sehingga perlu peningkatan produktivitas ayam buras dan peningkatan populasi ayam ras petelur, dimana peran swasta harus ditingkatkan khususnya untuk produksi telur ayam ras.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target ketersediaan lokal daging dan telur dari tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan indikator program sebagai berikut:

- Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana

Pada tahun 2015 dan 2016 dengan target masing-masing 80% dan pada tahun 2015. persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana terealisasi 70% sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 100%. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan Brucellosis pada tahun 2016 tercapai 100% tidak terjadi penyakit brucellosis. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan avian influenza (AI) pada tahun 2015 terjadi peningkatan status wilayah kesehatan hewan AI sebanyak 10% dan pada tahun 2016 peningkatan status sebanyak 80%. Pada tahun 2017 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 80% dari target 50% dan pada tahun 2018 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 90% dari target 50%. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan brucellosis pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 70% dan 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 persentase peningkatan status wilayah penyakit hewan Avian Influenza terealisasi 80% dan 100%. Sedangkan untuk persentase peningkatan status wilayah kesehatan penyakit hewan rabies pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 100% di masing-masing tahunnya.

Berdasarkan data diatas maka Kalimantan Timur bebas penyakit Brucellosis, Anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Hogcholera, Gumboro, SE, sedangkan penyakit hewan menular strategis yang masih endemis yaitu Jembrana, Rabies, AI, Surra, Hellmintiasis, Paratuberkulosis, IBR.

- Penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan

Pada tahun 2015 terjadi penurunan panyakit parasiter sebanyak 3% dan pada tahun 2016 penurunan panyakit parasiter sebanyak 21,78%. Pada tahun 2017 penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan terealisasi 11% dan pada tahun 2018 penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan terealisasi 36,96%.

Ketersediaan obat cacing sangat mempengaruhi penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan disamping sistem pemeliharaan yang baik seperti penggembalaan di siang hari dan kondisi kandang yang bersih.

- Peningkatan petugas i-SIKHNAS aktif

Pada tahun 2016 mencapai 12 orang atau 100% dari target sebanyak 12 orang. Dikarenakan adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan program dan kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator program dan kegiatan. Pada tahun 2017 dan 2018 indikator

program menjadi Peningkatan informasi kesehatan hewan melalui i-SIKHNAS terealisasi 9% dan 1,50% dari target 5% di masing-masing tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018 petugas i-SIKHNAS yang aktif berjumlah 16 orang.

- Penurunan kasus gangguan reproduksi

Pada tahun 2015 terdapat kasus gangguan reproduksi sebanyak 12% dari target 17%. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat kasus gangguan reproduksi sebanyak 81,10% dari target sebanyak 90%. Pada tahun 2017 penurunan kasus gangguan reproduksi terealisasi 73% dari target 10% dan pada tahun 2018 penurunan kasus gangguan reproduksi terealisasi 16,40% dari target 10%.

- Persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas

Pada tahun 2016 capaian persentase obat hewan sebanyak 90%. Pada tahun 2017 persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas terealisasi 100% dari target 60% dan pada tahun 2018 sebesar 243%. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi maka perlu peningkatan pengawasan obat hewan di tingkat distributor obat hewan.

b. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

Program pengembangan kawasan dan usaha peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

- Jumlah kawasan peternakan

Pada tahun 2014 realisasi jumlah kawasan peternakan terealisasi 6 kecamatan dengan rasio capaian 120%. Pada tahun 2015 teralisasi 6 kecamatan dengan capaian rasio 120%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 11 kecamatan dari target 5 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2016 mencapai 220%.

- Jumlah produksi telur

Persentase pada tahun 2013 ke 2014 persentase mengalami penurunan. Realisasi tahun 2013 sebesar 124,68% dan realisasi tahun 2014 sebesar 96,26%. Capaian produksi telur mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 masing-masing sebesar 116,69% dan 196,90%.

Adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan perubahan program kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator program dan kegiatan. indikator program yang mendukung ketersediaan lokal daging dan lokal telur adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Produksi Daging

Pada tahun 2017 peningkatan produksi daging terealisasi 3% dari target 3,3%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 100% dari target 3,60%.

- Peningkatan Produksi Telur

Pada tahun 2017 peningkatan produksi telur terealisasi 2,9% dari target 3%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 100% dari target 3,30%

c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

- Jumlah produksi daging

Pada tahun 2013 jumlah produksi daging terealisasi 68.668,10 ton dengan rasio capaian 124,88%. Pada tahun 2014 terealisasi 61.884,90 ton dengan rasio capaian 117,16%. Untuk tahun 2015 terealisasi 66.065,70 ton dengan rasio capaian 123,19%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 80.643,45 ton dengan rasio capaian 121,09% ,

- Persentase perkembangan ternak

Pada tahun persentase perkembangan ternak terealisasi sebanyak 7% dari target sebesar 5% dengan rasio capaian 140%. Populasi ternak khususnya sapi pada tahun 2017 mencapai 119.123 ekor belum dapat mencapai 2 juta ekor karena pemasukan ternak yang seharusnya mencapai 400.000 ekor tidak terealisasi.

d. Program penanggulangan kemiskinan bidang peternakan

Program penanggulangan kemiskinan bidang peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

Jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing

pada tahun 2015 dan 2016 jumlah masyarakat miskin yang telah dilatih dan beternak kambing dengan target masing-masing 75 dan 150 KK. Capaian indikator program jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing terealisasi 100% di masing-masing tahunnya.

2. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas

Pada tabel diatas dapat di jelaskan pencapaian jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas pada tahun 2013 terealisasi 117 KK dengan target yang ditetapkan sebesar

125 KK. Rasio capaian jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas sebesar 93,6%. Pada tahun 2014 realisasi jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas naik dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 115 KK dengan rasio capaian sebesar 109,52%. Pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 105 KK dengan rasio capaian sebesar 100%. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 128 KK dari target yang memanfaatkan sebesar 145 KK. Rasio capaian jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas sebesar 88,14%.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas dari tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

Produksi gas yang dihasilkan

Pada tahun 2013 terealisasi 104% atau sebanyak 234 m³ dari target 225 m³. Pada tahun 2014 produksi gas yang dihasilkan terealisasi 92% atau sebanyak 460 m³ dari target 500 m³. Produksi gas yang dihasilkan pada tahun 2015 terealisasi 100% atau sebanyak 189 m³. Sedangkan pada tahun 2016 produksi gas yang dihasilkan terealisasi 100% atau sebanyak 230,40 m³.

3. Jumlah kebuntingan hasil IB

Pada tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 terjadi penurunan capaian. Pada tahun 2013 jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) terealisasi 2.358 ekor dengan rasio capaian sebesar 100%. Pada tahun 2014 jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) terealisasi 1.750 ekor dengan target yang ditetapkan 2.415 ekor. Rasio capaian jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) mencapai 72,46%. Pada tahun 2015 jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) terealisasi 2.050 ekor dengan rasio capaian sebesar 79,67%. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) terealisasi 2.416 ekor dengan rasio capaian mencapai 88,49%.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target jumlah kebuntingan hasil Inseminasi Buatan (IB) dari tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

Service per conception (S/C)

Pada tahun 2014 terealisasi 2,48 (S/C) dari target 2,50 (S/C). Pada tahun 2015 terealisasi 2,10 (S/C) dari target 2,50 (S/C), sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 1,71 (S/C) dari target 2,20 (S/C).

b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

- Jumlah produksi daging

Pada tahun 2013 jumlah produksi daging terealisasi 68.668,10 ton dengan rasio capaian 124,88%. Pada tahun 2014 terealisasi 61.884,90 ton dengan rasio capaian 117,16%. Untuk tahun 2015 terealisasi 66.065,70 ton dengan rasio capaian 123,19%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 80.643,45 ton dengan rasio capaian 121,09%

- Persentase perkembangan ternak

Pada tahun persentase perkembangan ternak terealisasi sebanyak 7% dari target sebesar 5% dengan rasio capaian 140%

4. Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan

Pada tabel diatas dapat di jelaskan pencapaian jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 realisasi rasio capaian mencapai 100%. Pada tahun 2013 jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan terealisasi 30 KK dengan rasio capaian mencapai 100%. Pada tahun 2014 jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan terealisasi 45 KK dengan rasio capaian mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan terealisasi 74 KK dengan rasio capaian mencapai 74 KK dengan rasio capaian mencapai 113,85%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 74 KK dari target

yang ditetapkan sebesar 80 KK. Rasio capaian jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan pada tahun 2016 sebesar 92,50%.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan dari tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

Produksi pakan hijauan

Pada tahun 2014 terealisasi 97,25% atau sebanyak 35.906 ton dari target 36.920 ton. Pada tahun 2015 produksi pakan hijauan terealisasi 64,37% atau sebanyak 23.766 ton dari target 36.920 ton. Sedangkan produksi pakan hijauan pada tahun 2016 terealisasi 94,86% atau sebanyak 38.815,80 ton dari target 40.920 ton.

b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

- Jumlah produksi daging

Pada tahun 2013 jumlah produksi daging terealisasi 68.668,10 ton dengan rasio capaian 124,88%. Pada tahun 2014 terealisasi 61.884,90 ton dengan rasio capaian 117,16%. Untuk tahun 2015 terealisasi 66.065,70 ton dengan rasio capaian 123,19%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 80.643,45 ton dengan rasio capaian 121,09%

- Persentase perkembangan ternak

Pada tahun persentase perkembangan ternak terealisasi sebanyak 7% dari target sebesar 5% dengan rasio capaian 140%

5. Jumlah Usaha yang memperoleh sertifikat NKV

Pada tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2013 jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) terealisasi 11 unit usaha dari target 19 unit usaha dengan rasio capaian 57,89%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pada tahun 2014 terealisasi 2 unit usaha dari target 5 unit usaha dengan rasio capaian 40%. Pada tahun

2015 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tahun 2015 sebesar 8 unit usaha dari target 5 unit usaha dengan rasio capaian 160%. Pada tahun 2016 jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) terealisasi 9 unit usaha dengan rasio capaian mencapai 180%.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari tahun 2013-2016 adalah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan indikator program jumlah usaha pengolahan hasil peternakan.

Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan

Pada tahun 2013 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 2 unit dengan rasio capaian 100% dan pada tahun 2014 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 2 unit dengan rasio capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 4 unit dengan rasio capaian 200%

Adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan perubahan program kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator program dan kegiatan. Berdasarkan revisi renstra maka Indikator Kinerja Kunci sasaran jumlah masyarakat yang memanaatkan hasil biogas, jumlah kebuntingan hasil IB, jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan dan jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tidak digunakan lagi sehingga program yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Lokal Daging dan Telur

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan indikator program sebagai berikut:

- Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana

Pada tahun 2015 dan 2016 dengan target masing-masing 80% dan pada tahun 2015. persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana terealisasi 70% sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 100%. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan Brucellosis pada tahun 2016 tercapai 100% tidak terjadi

penyakit brucellosis. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan avian influenza (AI) pada tahun 2015 terjadi peningkatan status wilayah kesehatan hewan AI sebanyak 10% dan pada tahun 2016 peningkatan status sebanyak 80%. Pada tahun 2017 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 80% dari target 50% dan pada tahun 2018 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 70% dari target 50%. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan brucellosis pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 70% dan 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 persentase peningkatan status wilayah penyakit hewan Avian Influenza terealisasi 80% dan 90%. Sedangkan untuk persentase peningkatan status wilayah kesehatan penyakit hewan rabies pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 100% di masing-masing tahunnya.

- Penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan

Pada tahun 2015 terjadi penurunan panyakit parasiter sebanyak 3% dan pada tahun 2016 penurunan panyakit parasiter sebanyak 21,78%. Pada tahun 2017 dan 2018 penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan terealisasi 11% dan -37%

- Peningkatan petugas i-SIKHNAS aktif

Pada tahun 2016 mencapai 12 orang atau 100% dari target sebanyak 12 orang. Dikarenakan adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan program dan kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator program dan kegiatan. Pada tahun 2017 dan 2018 indikator program menjadi Peningkatan informasi kesehatan hewan melalui i-SIKHNAS terealisasi 9% dan 1,8 % dari target 5% di masing-masing tahunnya.

- Penurunan kasus gangguan reproduksi

Pada tahun 2015 terdapat kasus gangguan reproduksi sebanyak 12% dari target 17%. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat kasus gangguan reproduksi sebanyak 81,10% dari target sebanyak 90%. Pada tahun 2017 penurunan kasus gangguan reproduksi terealisasi 73% dari target 10% dan pada tahun 2018 penurunan kasus gangguan reproduksi terealisasi -3,33% dari target 10%.

- Persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas

Pada tahun 2016 capaian persentase obat hewan sebnyak 90%. Pada tahun 2017 persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas terealisasi 100% dari target 60% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 142,85%.

b. Program Peningkatan Produksi Peternakan

- Peningkatan Populasi Ternak

Untuk meningkatkan ketersediaan lokal daging dan lokal telur tahun 2017 dan 2018 perlu didukung dengan adanya peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak tersebut adalah sebagai berikut:

- Ternak Sapi

Pada tahun 2017 peningkatan populasi ternak sapi terealisasi 7% dari target 6% dengan capaian sebesar 110,33%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 5,23% dari target 5% dengan capaian sebesar 104,6%

- Ternak Kerbau

Pada tahun 2017 peningkatan populasi ternak kerbau terealisasi 4,93% dari target 5% dengan capaian sebesar 98,60%. Sedangkan pada tahun 2018 peningkatan populasi ternak kerbau terealisasi 0,80% dari target 3% dengan capaian sebesar 26,67%

- Ternak Kambing

Pada tahun 2017 peningkatan populasi ternak kambing terealisasi 7,02% dari target 7% dengan capaian sebesar 7% sedangkan pada tahun 2018 peningkatan populasi ternak kambing terealisasi 6,71% dari target 6% dengan capaian 111,83%.

- Ternak Babi

Pada tahun 2017 peningkatan populasi ternak babi terealisasi 6% dari target 5% dengan capaian sebesar 112,20% sedangkan pada tahun 2018 peningkatan populasi ternak babi terealisasi 5,62% dari target 5% dengan capaian 112,40%.

- Ternak Ayam Buras

Pada tahun 2017 peningkatan populasi ternak ayam buras terealisasi 6,72% dari target 6% dengan capaian sebesar 112% sedangkan pada tahun 2018 peningkatan populasi ternak ayam buras terealisasi 6,20% dari target 6% dengan capaian 103,33%.

- Service Per Conception (S/C)

Pada tahun 2014 terealisasi 2,48 (S/C) dari target 2,50 (S/C). Pada tahun 2015 terealisasi 2,10 (S/C) dari target 2,50 (S/C), sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 1,71 (S/C) dari target 2,20 (S/C). Pada tahun 2017 service per conception pada tahun 2017 terealisasi 1,99% dari target 2%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 1,98% dari target 2% dengan rasio capaian 99%

c. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

Progran penyidikan dan pengujian keswan dan kesmavet dengan indikator program sebagai berikut:

Peningkatan sampel yang diperiksa

Pada tahun 2017 peningkatan sampel yang diperiksa terealisasi 5,13% dari target 10% dengan capaian 51,30%. Sedangkan pada tahun 2018 peningkatan sampel yang diperiksa terealisasi 6% dari target 10% dengan rasio capaian 60%

d. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Progran peningkatan mutu genetic ternak dengan indikator program sebagai berikut:

Peningkatan produksi bibit ternak sapi, straw, dan velvet

Pada tahun 2017 peningkatan produksi bibit ternak sapi, straw, dan velvet terealisasi 10% dengan rasio capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 9,39% dari target 10% dengan rasio capaian mencapai 93,90%

2. Nilai Tukar Peternak

Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

Progran pengembangan kawasan dan usaha peternakan dengan indikator program sebagai berikut:

- Jumlah kawasan peternakan

Pada tahun 2014 realisasi jumlah kawasan peternakan terealisasi 6 kecamatan dengan rasio capaian 120%. Pada tahun 2015 teralisasi 6 kecamatan dengan capaian rasio 120%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 11 kecamatan dari target 5 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2016 mencapai 220%.

- Jumlah produksi telur

Persentase pada tahun 2013 ke 2014 persentase mengalami penurunan. Realisasi tahun 2013 sebesar 124,68% dan realisasi tahun 2014 sebesar 96,26%. Capaian produksi telur mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 masing-masing sebesar 116,69% dan 196,90%.

Adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan perubahan program kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator program dan kegiatan. indikator program yang mendukung Nilai Tukar Peternak (NTP) adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Produksi Daging

Pada tahun 2017 peningkatan produksi daging terealisasi 3% dari target 3,3%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 3,60% dari target 3,60% dengan rasio capaian 100%

- Peningkatan Produksi Telur

Pada tahun 2017 peningkatan produksi telur terealisasi 2,9% dari target 3%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 3,30% dari target 3,30% dengan rasio capaian 100 %

3. Peningkatan produksi daging higienis

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2013 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 2 unit dengan rasio capaian 100% dan pada tahun 2014 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 2 unit dengan rasio capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terealisasi 4 unit dengan rasio capaian 200%

Sesuai dengan adanya revisi renstra tahun 2017 atas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan perubahan program kegiatan terdapat perubahan indikator program. Indikator program yang mendukung Peningkatan Produksi daging Higienis adalah sebagai berikut :

- Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV

Pada tahun 2017 peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) terealisasi 11% dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 555,50%. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 2% dari target yang ditetapkan sebesar 1%. Rasio capaian tahun 2018 sebesar 200%

- Penurunan kasus cemaran mikroba

Pada tahun 2017 penurunan kasus cemaran mikroba terealisasi 21,49% dari target sebesar 25%. Rasio capaian yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 85,96%. Sedangkan pada tahun 2018 penurunan kasus cemaran mikroba terealisasi 3,58% dengan target sebesar 2%. Rasio capaian yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 179%.

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN TAHUN	REALISASI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan)	72.318.668.123	67.517.958.264	80.919.778.040	59.605.749.228	20.299.891.000	22.157.153.540	68.364.104.156	64.004.750.743	58.679.032.575	56.382.867.834	18.408.860.749	21.359.474.744	95	95	73	95	91	96	(21,07)	(21)
	Belanja Tidak Langsung	11.563.468.000	13.519.629.826	13.927.778.040	14.379.399.553	14.306.854.000	14.059.017.500	10.125.744.118	12.721.375.591	12.821.732.901	12.875.140.231	12.513.890.163	13.372.534.902	88	94	92	90	87	95	4	6
	Belanja Langsung	60.755.200.123	53.998.328.438	66.992.000.000	45.226.349.675	5.993.037.000	8.098.136.040	58.238.360.038	51.283.375.152	45.857.299.674	43.507.727.603	5.894.970.586	7.986.939.842	96	95	68	96	98	99	(33)	(33)
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Provinsi)	62.007.865.423	55.585.020.764	68.691.215.260	48.150.030.053	20.299.891.000	22.157.153.540	58.641.301.951	53.424.402.879	48.754.717.603	45.681.924.294	18.408.860.749	21.359.474.744	95	96	71	95	91	96	(19)	(18)
	Belanja Tidak Langsung	9.872.768.000	11.186.529.826	11.706.781.540	12.285.399.553	14.306.854.000	14.059.017.500	8.665.929.118	10.670.205.591	11.037.063.901	11.009.630.231	12.513.890.163	13.372.534.902	88	95	94	90	87	95	7	9
	Belanja Langsung	52.135.097.423	44.398.490.938	56.984.433.720	35.864.630.500	5.993.037.000	8.098.136.040	49.975.372.833	42.754.197.288	37.717.653.702	34.672.294.063	5.894.970.586	7.986.939.842	96	96	66	97	98	99	(31)	(31)
3	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	4.619.193.000	4.096.430.000	3.838.998.400	5.234.106.400	-	-	4.361.490.259	3.810.196.969	3.649.416.357	4.874.358.967	-	-	94	93	95	93	-	-		
	Belanja Tidak Langsung	646.400.000	915.680.000	801.024.000	765.960.000	-	-	550.125.000	772.180.000	732.959.000	665.265.000	-	-	85	84	92	87	-	-		
	Belanja Langsung	3.972.793.000	3.180.750.000	3.037.974.400	4.468.146.400	-	-	3.811.365.259	3.038.016.969	2.916.457.357	4.209.093.967	-	-	96	96	96	94	-	-		
4	UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan	5.691.609.700	7.836.507.500	8.389.564.380	6.221.612.775	-	-	5.361.311.946	6.770.150.895	6.274.898.615	5.826.584.573	-	-	94	86	75	94	-	-		
	Belanja Tidak Langsung	1.044.300.000	1.417.420.000	1.419.972.500	1.328.040.000	-	-	909.690.000	1.278.990.000	1.051.710.000	1.200.245.000	-	-	87	90	74	90	-	-		
	Belanja Langsung	4.647.309.700	6.419.087.500	6.969.591.880	4.893.572.775	-	-	4.451.621.946	5.491.160.895	5.223.188.615	4.626.339.573	-	-	96	86	75	95	-	-		

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Dari tabel 2.5 diatas dapat diuraikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bahwa anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp5.993.037.000 turun 86,75% terhadap anggaran tahun 2016 sebesar Rp45.226.349.675. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 35% menjadi Rp8.098.136.040,07. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator program tidak tercapai dan ada beberapa program/kegiatan yang tidak dilanjutkan sejak tahun 2016 seperti pengadaan ternak, pengadaan instalasi biogas dan penanganan kemiskinan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya manusia

Dalam kurun waktu 2011-2018 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti *check point*, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan

keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang.

d. Konsistensi penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan

Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal

- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalulintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kaltim bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat.

1. Meningkatnya Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Berdasarkan data konsumsi maka peningkatan konsumsi daging pada tahun 2013-2017 mencapai 6,66%. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2017 (dalam ton)

No	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	9.595,2	10.414,6	10.679,4	8.804,2	9.393,5
2	Kerbau	47,6	62,6	34,6	122,8	135,1
3	Kuda	4,8	2,3	1,3	1,0	1,5
4	Kambing	531,8	1.097,5	465,8	529,2	637,9
5	Domba	4,0	5,7	3,5	19,3	12,1

No	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
6	Babi	1.220,8	1.442,6	962,5	888	883,2
7	Ayam Buras	5.514,7	4.866,7	4.790,5	5.008	5.690,2
8	Ayam Petelur	664,5	293,4	414,1	360,8	352,4
9	Ayam Pedaging	43.639,2	48,374	54.727,4	55.925,7	61.706
10	Itik	61,1	188,8	127,5	199,5	263,2
11	Kelinci	0,8	1,1	5,3	5,8	6,7
12	Puyuh	0,5	5,1	6,2	6,6	4,4
13	Merpati	0,1	1,2	1,1	1,1	1,1
14	Itik Manila	0,4	12,2	15,1	15,8	22,5
	Jumlah	61.285,4	66.767,8	72.234,4	71.888	79.324

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Struktur konsumsi daging mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 konsumsi daging mencapai 79.324 ton. Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 tahun terakhir mencapai lebih dari 61.706 ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler tersebut 77,78% berasal dari lokal Kaltim. Saat ini perkembangan ternak ayam ras broiler sudah sepenuhnya ditangani swasta, pemerintah hanya sebagai regulator saja.

Konsumsi daging sapi mulai tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya ini terjadi karena dari jumlah konsumsi daging sapi tersebut masih didatangkan dari luar daerah. Pada tahun 2017 konsumsi daging di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.363,5 ton dibandingkan dengan tahun 2016 konsumsi daging di Provisni Kalimantan Timur mencapai 8.804,2 ton. Apabila dibanding dengan tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 6,69%. Konsumsi daging secara keseluruhan terdapat peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 peningkatan tersebut sebesar 10,34%

Tabel 2.7 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2017 (dalam ton)

No	Jenis Telur	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ayam Buras	2.686,76	1.660,87	1.549,80	1.728,72	1.735,14
2	Ayam Petelur	16.359,27	17.331,70	21.314,83	15.163,50	19.028,65
3	Itik	1.809,95	2.546,56	2.401,71	966,95	1.072,28
4	Puyuh	66,18	131,54	183,24	43,01	31,78

No	Jenis Telur	2013	2014	2015	2016	2017
5	Itik Manila	3,62	94,83	117,82	123,20	175,58
	Jumlah	20.925,78	21.765,50	25.567,41	18.025,39	22.043,43

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Struktur konsumsi telur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah konsumsi telur mencapai 20.925,78 ton. Pada tahun 2014 konsumsi telur naik 839,72 atau mencapai 21.765,5 ton. Pada tahun 2015 konsumsi telur juga mengalami kenaikan 4.641,63 ton atau mencapai 25.567,41 dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2016 konsumsi telur mengalami penurunan menjadi 18.025,39 ton. Sedangkan pada tahun 2017 konsumsi telur mencapai 22.043 ton naik sebesar 111,7% dibandingkan tahun 2013.

Tabel 2.8 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2017 (dalam ton)

No	Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Susu	19.514,14	19.709,28	19.906,82	20.105,44	20.106,44

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Struktur konsumsi telur di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 konsumsi susu mencapai 19.514,14 ton. Pada tahun 2014 konsumsi susu mencapai 19.709,28 ton. Pada tahun 2015 konsumsi susu naik menjadi 19.906,82 ton. Pada tahun 2016 konsumsi susu naik menjadi 20.105,44 ton. Sedangkan pada tahun 2017 konsumsi susu naik menjadi 20.106,44 ton. Sehingga secara keseluruhan terjadi peningkatan konsumsi telur sebesar 25,75%.

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kaltim diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkubanan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi mini ranch.

Tabel 2.9 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	95.085	101.743	110.097	118.712	119.123
2	Sapi Perah	48	77	79	97	107
3	Kerbau	5.513	5.908	6.680	7.144	7.055
4	Kambing	50.072	55.259	59.258	57.794	61.526
5	Domba	229	239	265	320	281
6	Babi	61.478	64.214	68.238	75.475	85.749
7	Kuda	47	57	107	101	91
8	Ayam Buras	5.616.679	4.287.075	4.561.377	4.768.534	5.418.086
9	Ayam Petelur	1.195.743	686.278	966.432	842.176	822.533
10	Ayam Pedaging	43.802.742	46.553.307	55.783.230	60.747.455	66.268.201
11	Itik	153.107	198.371	192.883	192.505	219.149
12	Kelinci	9.413	12.672	11.776	13.063	15.005
13	Puyuh	7.500	52.511	62.669	68.643	46.693
14	Merpati	1.194	3.687	4.312	4.182	4.163

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

3. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas pada tahun 2013 terealisasi 117 KK dengan target yang ditetapkan sebesar 125 KK. Rasio capaian jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas sebesar 93,6%. Pada tahun 2014 realisasi jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas naik dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 115 KK dengan rasio capaian sebesar 109,52%. Pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 105 KK dengan rasio capaian sebesar 100%. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas terealisasi 128 KK dari target yang memanfaatkan sebesar 145 KK. Rasio capaian jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil biogas sebesar 88,14%.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Memperhatikan kondisi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan suatu analisis baik terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “*Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Peningkatan Konsumsi*”, sehingga akar masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan dapat dilihat dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Percepatan peningkatan populasi ternak belum sebanding dengan peningkatan konsumsi	1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah	1. Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang 2. Manajemen perkawinan ternak belum optimal 3. Kurangnya penerapan teknologi peternakan tepat guna 4. Good Farming Practice belum diterapkan dengan baik 5. Kaderisasi peternak semakin menurun 6. Penataan kelembagaan peternakan belum optimal 7. Angka kematian pedet tinggi
	2. Produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal	1. Perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal 2. Sumber pakan kualitas unggul masih rendah
	3. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal	1. Kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) masih endemis dan resiko penyakit emerging. 2. Pengawasan Lalu lintas hewan di Kaltim belum tertib administrasi. 3. Pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal.
	4. Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet belum optimal	1. Surveilans dan pengujian penyakit hewan belum optimal 2. Surveilans dan pengujian produk asal hewan belum optimal

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	5. Produksi lokal daging sapi dan telur masih rendah	1. Penataan kawasan peternakan belum optimal 2. Keterbatasan lahan untuk usaha peternakan 3. Pemanfaatan limbah pertanian belum optimal 4. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang 5. Pengambilan dan pengumpulan data peternakan belum terorganisir 6. Peran swasta masih kurang dalam usaha peternakan 7. Skala usaha peternakan masih kecil dan tersebar
	6. Usaha pengolahan produk peternakan belum dikelola secara profesional	1. Hilirisasi produk peternakan masih rendah 2. Supply demand ternak potong tidak seimbang 3. Manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang 4. Penerapan higienis dan sanitasi masih kurang 5. Penyelamatan betina produktif belum optimal

Secara rinci permasalahan pembangunan peternakan dapat diuraikan sebagai berikut ;

a). Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah ;

Peningkatan populasi di Kalimantan Timur pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, terutama pada ternak sapi pada tahun 2013 populasi berjumlah 95.085 ekor pada tahun 2017 populasi berjumlah 119.123 ekor, berdasarkan data tersebut peningkatan yang terjadi pada populasi ternak sapi hanya sebesar 5.80% tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, Good Farming Practice tidak diterapkan dengan baik, kaderisasi peternak masih rendah dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Tabel. 3.2. Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017 (ekor).

No	Komoditas Ternak	Tahun					Rate (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sapi	95.085	101.743	110.097	118.712	119.123	5,80
2	Sapi Perah	48	77	79	97	107	22,19
3	Kerbau	5.513	5.905	6.680	7.144	7.055	6,36
4	Kambing	50.072	55.259	59.258	57.794	61.526	5,28
5	Domba	229	239	265	320	281	5,25
6	Babi	61.478	64.214	68.238	75.475	85.749	8,67
7	Kuda	47	57	107	101	91	17,96
8	Ayam Buras	5.616.679	4.287.075	4.561.377	4.768.534	5.418.086	-8,93
9	Ayam Petelur	1.195.743	686.278	966.432	842.176	822.533	-8,93
10	Ayam Pedaging	43.802.742	46.553.307	55.783.230	60.747.455	66.268.201	10,90
11	Itik	153.107	198.371	192.883	192.505	219.149	9,38
12	Kelinci	-	12.672	11.776	13.063	15.005	5,79
13	Puyuh	7.500	52.511	62.669	68.643	46.693	57,96
14	Merpati	1.194	3.687	4.312	4.182	4.163	36,65
15	Itik Manila	3.707	19.408	24.114	25.215	35.934	76,45

Sumber data : *Buku Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur*

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah pemotongan per tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi saat ini 119.123 ekor sehingga masih perlu penambahan 311.905 ekor.

Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Bobot lahir rata-rata 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
2. Bobot potong sapi rata-rata 251 kg
3. Calving interval rata-rata 22 bulan

Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir hingga mencapai 40 kg, untuk bobot potong sapi rata-rata 400 kg dan calving interval rata-rata 13 - 14 bulan.

- b). Produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal

UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas diantaranya adalah menghasilkan bibit

dan benih ternak maupun hijauan pakan ternak. Saat ini komoditas ternak yang ada di UPTD tersebut meliputi rusa sambar, *elite bull* (*Brahman Cross*, Bali dan *Simental*), indukan sapi bali, indukan sapi Brahman Cross dan Ayam Buras. Rusa sambar dikembangkan untuk dapat menghasilkan tanduk rusa muda yang kemudian diproses menjadi ekstrak velvet yang telah menjangkau pasar Nasional. Elite bull dapat menghasilkan semen segar yang kemudian diproses menjadi semen beku/ straw untuk dapat memenuhi kebutuhan straw dalam program UPSUS SIWAB, namun sampai saat ini prosuk straw tersebut belum bersertifikat SNI. Ayam buras dapat memberikan tambahan PAD dari penjualan telur per hari yang pasarnya sudah sangat bagus bahkan permintaan pasar lebih banyak dari produksi yang dihasilkan.

Target produksi semen beku sebanyak 10.000 dosis, kelahiran sapi bibit 30 ekor per tahun, kelahiran rusa 75 ekor per tahun, produksi bibit hijauan pakan 5.000 stek/pols per tahun. Target-target tersebut belum dapat dicapai karena perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal, sumber pakan berkualitas unggul masih kurang, dan sarana prasarana pendukung kurang memadai seperti sumber daya listrik, sumber daya air, jaringan nirkabel, jalan produksi, angkutan pakan, padang penggembalaan dan kebun bibit rumput.

- c). Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kaltim kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kaltim seperti Rabies, Salmonellosis, fasiolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedic dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut.

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga kaltim menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur

keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kaltim hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak.

Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point.

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medic dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada di setiap kecamatan.

Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

d). Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet belum optimal

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan diagnostik laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan laboratorium yaitu :

- a. Penyidikan dan pengujian penyakit hewan (P2PH) meliputi
 - Pengujian Serologi,
 - Pengujian Virologi,
 - Pengujian Parasitologi
 - Pengujianpatologi Anatomi
- b. Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan (P2KHP) meliputi
 - uji *Salmonella*,
 - uji *E.coli*,
 - uji *Staphylococcus*,
 - uji *Colliform*
 - uji Total Plate Count (TPC)

Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab./Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, maka perlu penambahan tenaga penguji dan peningkatan SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan kemajuan teknologi yang ada. Prasarana dan sarana yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagai laboratorium type B telah memadai, namun adanya alat yang rusak maka diperlukan adanya perbaikan, perawatan dan pembelian alat yang

baru. Seiring perkembangan teknologi diperlukan adanya upaya peningkatan kecanggihan peralatan yang ada guna efisiensi waktu, tenaga dan biaya untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas terhadap pelayanan laboratorium dan hasil uji yang kredible, kepuasan konsumen adalah salah satu misi keberhasilan pelayanan dari UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

e). **Produksi Lokal Daging Sapi dan Telur Masih Rendah**

Produksi daging (daging merah dan daging putih) di Kalimantan Timur pada umumnya masih dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Data produksi daging tahun 2017 mencapai 77.786,6 ton dan konsumsi daging pada tahun 2017 mencapai 77.784,5 ton. Produksi daging dipengaruhi oleh jumlah pemotongan ternak sapi, kerbau, ayam, kambing, domba dan babi. Pada tahun 2017 terdapat kelebihan 2,1 ton (0.003%) untuk produksi daging, akan tetapi data produksi dan konsumsi daging tersebut merupakan untuk semua komoditas ternak, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel. 3.3. Produksi Hasil Ternak Daging dan Telur di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017 (ton)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	r (%th)
1	Daging	58,656.4	59,707.5	70,066.0	71,908.5	77,786.6	7.49
2	Telur	16,072.2	9,286.2	11,628.0	10,812.7	11,260.0	-4.97

Sumber : Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Produksi daging untuk komoditas ternak sapi pada tahun 2017 sebesar 8.015,8 ton, dibanding dengan konsumsi daging sapi sejumlah 9.393,5 ton, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap daging sapi masih tinggi sedangkan produksi daging sapi belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk mencukupi konsumsi daging sapi maka dilakukan pemasukan daging beku sebesar 1.778,49 ton, sedangkan kekurangan kebutuhan konsumsi daging sapi sebesar 1.377,7 ton.

Tabel 3.4. Produksi Daging Sapi di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017 (ton)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	r (%th)
1	Daging Sapi	8,608.3	8,811.7	9,129.4	8,129.8	8,015.8	6.29

Sumber : Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Konsumsi terhadap produk peternakan seperti daging, telur dan susu setiap tahunnya cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh penambahan penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi yang berasal dari protein hewani asal ternak, pola hidup sehat serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas maka dapat dilihat rata-rata peningkatan produksi daging mencapai 7,49 %/thn, sedangkan pada Tabel 3.5. konsumsi mengalami peningkatan 6,29 %/thn; namun peningkatan produksi daging tersebut disebabkan karena pemasukan sapi potong dari luar kaltim sehingga kontribusi lokal daging sapi baru mencapai 27,36%.

Produksi komoditas ternak ayam pedaging sudah tercukupi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, berbanding terbalik dengan komoditas ternak sapi. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi sapi potong. Perkembangan konsumsi hasil ternak terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Konsumsi Hasil Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017 (Ton)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	r (%th)
1	Daging	61,122.8	66,767.8	72,234.4	71,888.0	77,784.5	6.29
2	Telur	20,925.78	21,765.50	25,567.41	18,025.39	22,043.43	3.57
3	Susu	19,514.14	19,709.28	19,807.82	19,906.86	20,006.40	1.00

Sumber : Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tiga komoditas peternakan inilah yang saat ini masih didatangkan dari luar Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017 angka pemasukan produk daging dan telur mencapai 5.374,64 ton daging dan 12.755,04 ton telur, bahkan untuk komoditas susu 100% berasal dari luar Kalimantan timur berupa susu olahan.

f). Usaha Pengolahan Produk Peternakan Belum Dikelola Secara Profesional

Usaha pengolahan hasil peternakan di Kalimantan Timur masih terbatas pada skala usaha rumah tangga. Permasalahan yang mendasar dalam memajukan usaha pengolahan hasil peternakan adalah masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia (peternak dan pelaku usaha) dan kelembagaan usaha. Selain itu, belum tersedianya bahan baku secara kontinyu dan masih banyaknya penyedia bahan pangan asal hewan yang belum memahami produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Ketersediaan pangan hewani yang ASUH merupakan manifestasi konkrit dari salah satu sasaran pembangunan di bidang keamanan pangan. Ketersediaan pangan yang ASUH dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan Halalisasi Produk.

Tingkat pengetahuan pelaku usaha masih terbatas dan belum memperhatikan secara maksimal mengenai sanitasi dan higienitas produk peternakan yang dihasilkan. Untuk menjamin keamanan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), setiap unit usaha pengolahan produk peternakan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas pangan asal hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan dan mutu pangan. Penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha produk peternakan memungkinkan untuk mengantisipasi terjadinya bahaya yang mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaklayakan mutu produk peternakan yang diproduksi dan yang diedarkan, sehingga setiap pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib mencantumkan nomor yang tercantum pada NKV tersebut.

Akar permasalahan yang dihadapi dalam usaha pengolahan produk peternakan secara profesional adalah :

1. Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah
2. Suplay Demand ternak potong tidak seimbang
3. Manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang
4. Penerapan higienist dan sanitasi masih kurang

Memperhatikan kondisi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap isu-isu

strategis baik internal maupun eksternal yang akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

VISI :

Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2018-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan Visi yaitu:

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemantapan, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. BERDAULAT memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERA, DAmai, unggUL, dan kuAT.**

MISI :

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Misi Kedua:

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi Ketiga:

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi Keempat:

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkedaulatan

Misi Kelima:

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Untuk mendukung misi kedua maka ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 3.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi/Program	Penghambat	Pendorong
<p>Misi ke dua : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.</p> <p>Program unggulan ke enam : Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat.</p>	<p>a. Populasi dan Produktivitas Ternak masih rendah. Produksi</p> <p>b. Pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal.</p> <p>c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular (PHM) belum maksimal</p> <p>d. pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet belum optimal.</p> <p>e. Produksi Lokal daging sapi dan telur masih rendah.</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016.</p> <p>b. Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/pd.300/8/2014</p> <p>c. Tersedianya lahan eks tambang yang telah direklamasi dan revegetasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tmur Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengendalian pematangan betina produktif.</p>

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :” *Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak*”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;
Ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien. Saat ini ternak dan produk ternak masih belum optimal untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya karena inovasi dan teknologi masih rendah terutama ditingkat off farm, khususnya dibidang pengolahan dan pemasaran.
- c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;
Usaha yang berkelanjutan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti dibidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan SDA setempat dan daur ulang limbah peternakan. Dengan demikian bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan usaha yang berkelanjutan dan merupakan renewable produk.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Untuk ini pada kurun waktu 2015-2019 reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan ikut berperan dalam nawacita.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Lengkapi dengan tabel 3.7 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2015-2019

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Angka Kebuntingan	Sapi Indukan Wajib Bunting	Jumlah Akseptor	7.050	6.800	6.800	6.800	6.800

Sumber: Renstra Ditjen PKH

Tabel 3. 8. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019

N o	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Kebuntingan sapi 3 juta ekor	a. Sistem pemeliharaan ekstensif dan semi intensif b. Lokasi peternak tersebar c. Distribusi N2 Cair sulit	a. Pedoman umum Pelaksanaan Upsus Siwab b. Populasi Betina Produktif c. Kebutuhan Sapi Potong

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
		dilaksanakan d. Peternak lebih menyukai kawin alam e. Laporan Petugas UPSUS SIWAB tidak lancar terkendala Jaringan Internet	Kaltim masih tinggi d. Dana operasional didukung APBN

Sumber: Renstra Ditjen PKH

B. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI

Adapun Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019 adalah *“Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”*

Untuk mencapai Visi tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- b. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan
- c. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana
- d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan , dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- f. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan kelembagaan alat dan mesin pertanian
- g. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang prasarana dan sarana pertanian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan peternakan.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha peternakan yang mudah di akses peternak.
- c. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana peternakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3.9. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terpenuhinya Prasarana dan Sarana Pengembangan Peternakan	Irigasi Perpompaan	Jumlah Pompa untuk komoditas peternakan	7	7	7	7	7

Sumber: Renstra Ditjen PSP

Tabel 3.10. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

N o	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Terpenuhinya Irigasi Perpompaan untuk pengembangan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak tersedianya sumber air b. Tingginya biaya operasional pemanfaatan Pompa c. Laporan perkembangan fisik di kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkembangnya usaha peternakan b. Rencana pengembangan mini ranch c. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Sumber: Renstra Ditjen PSP

C. Keterkaitan RENSTRA Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang

ada dimerger menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sudah menjadi acuan, namun RENSTRA 2018-2023 belum menjadi acuan karena pemilihan kepala daerah Kabupaten/ Kota lebih dahulu dilaksanakan, sehingga keterkaitan dengan renstra Kabupaten/Kota masih dengan Renstra dengan periode sebelumnya seperti :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 :“ Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian ”
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2019 – 2023 : “Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinergis dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.

8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : 1) Meningkatkan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, 2) Meningkatkan kinerja perikanan tangkap dan budidaya serta nilai tambah industri perikanan, 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 adalah “Terwujudnya Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Tangguh Berwawasan Agribisnis”.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.”

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (ASPEK kinerja dari SDGs)

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : “ Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian ”.

A. Rencana Tata Ruang Wilayah

Belum adanya kawasan atau lahan khusus pengembangan peternakan dipandang sebagai salah satu faktor belum tercapainya swasembada daging sapi dan kerbau di Kaltim. Sebab, upaya percepatan mewujudkan swasembada daging dengan pengembangan peternakan skala besar bergantung pada lahan potensial sebagai lokasi pengembangan yang tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pakan di lahan tersebut.

Pengembangan kawasan peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional terbagi menjadi 3 kawasan yaitu :

1. Kawasan khusus padang penggembalaan termasuk di dalamnya lahan eks tambang. Wilayah pengembangannya terdapat di NTT, NTB, Pulau Irian dan khusus lahan eks tambang di Kaltim
2. Kawasan daerah padat penduduk terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Intensif umumnya di wilayah pengembangan peternakan dengan lokasi terbatas pada umumnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali
 - b. Kawasan integrasi ternak-tanaman :
Pada umumnya pengembangan peternakan berada di wilayah pertanian tanaman pangan seperti padi, singkong, jagung dan lain-lain.
3. Kawasan Integrasi ternak-tanaman perkebunan
- Pada umumnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdiri atas :
- a) Integrasi sapi-sawit :
Semua kawasan pengembangan sapi potong di Kalimantan Timur termasuk di dalam integrasi sapi-sawit.
 - b) Integrasi sapi dengan tanaman perkebunan lainnya
Pada umumnya tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, maka pola pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan kawasan baik kawasan yang sudah ada maupun kawasan baru yang potensial di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan pengembangan sapi potong dengan pola integrasi terdiri atas :

- a. Kabupaten Berau
- b. Kutai Kartanegara
- c. Kutai Timur
- d. Paser
- e. Penajam Paser Utara

Di samping komoditas strategis nasional yaitu sapi potong dikembangkan pula kawasan komoditas unggulan sebagai berikut :

- a. Kawasan pengembangan ternak kerbau di Kutai Kartanegara
- b. Kawasan pengembangan ternak babi di Kutai Barat
- c. Kawasan pengembangan ayam Buras di Kota Samarinda

Kawasan industri tanaman pangan berlokasi di PPU dan Paser yang terletak di bagian Selatan Kaltim sebagai *hinterland* Kota Balikpapan. Sementara itu, sektor peternakan juga baik dikembangkan di wilayah tersebut. Penajam Paser Utara (PPU) fokus pada pengembangan unggas di Kecamatan Penajam dan Babulu, Sapi Brahma dan Sapi Bali di Kecamatan Sepaku serta Rusa Api-api di Kecamatan

Waru. PPU dan Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kaltim.

Program pengembangan ternak sapi melalui pemanfaatan lahan eks tambang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengambil nilai lebih dari lokasi eks tambang yang rata-rata tidak subur lagi. Dengan pembangunan kawasan integrasi ternak-tambang ini diharapkan tanah yang strukturnya telah rusak dapat kembali subur dengan penggunaan pupuk kandang hasil kotoran ternak. Selain itu, pemanfaatan lahan eks tambang telah dilakukan pemerintah dengan dukungan perusahaan, selaku pemilik lahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Di antara daerah yang paling banyak lahan eks tambang batubara adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, akan dikembangkan juga di Paser, Kutim, Berau dan Samarinda.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Grand Strategi Pembangunan Ekonomi Kaltim adalah Menuju Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan 2 (dua) Strategi Utama, yaitu: Mengembangkan Industri Eksisting (Minyak, Pupuk, Gas, CPO, Batubara), dan Membangun Industri Berbasis Pertanian dengan Pendekatan Skala Ekonomi dan Cluster. Kalimantan Timur telah menetapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai strategi holistik dimana pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi berjalan beriringan. Arah pembangunan ekonomi Kaltim saat ini masih dalam masa transisi dari ekonomi industri eksisting menuju industri berbasis pertanian.

Strategi Pembangunan Kaltim kedepan diarahkan pada pro-growth, pro job, pro poor dan pro environment, dimana pemerintah Prov. Kaltim akan mengawal keberlanjutan pembangunan melalui strategi pembangunan berwawasan lingkungan, untuk menuju Kaltim sebagai pusat agroindustri dengan energi ramah lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi emisi. Strategi Green Growth, sendiri adalah dengan: Mengembangkan sektor rendah karbon dan bernilai tambah tinggi, dan Mengurangi emisi karbon.

Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Sumber daya tersebut, selain

digunakan untuk kebutuhan pangan juga dapat berpotensi sebagai sumber energi dengan cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi telah memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif yang dapat mengurangi jumlah gas metana di udara. Hingga tahun 2017 sudah ada 525 unit biogas yang telah dibangun.

Selain itu, pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik sangat mendukung usaha pertanian tanaman sayuran, salak dan tanaman perkebunan (kelapa sawit). Dari sekian banyak kotoran ternak yang terdapat di daerah sentra produksi ternak banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, sebagian di antaranya terbuang begitu saja, sehingga sering merusak lingkungan yang akibatnya akan menghasilkan bau yang tidak sedap.

Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan tidak mencemari lingkungan. Cara ini efektif untuk mengurangi gas metana yang terdapat pada feses ternak. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbondioksida (CO₂) yang ikut memberikan kontribusi bagi efek rumah kaca (*Green House Effect*) yang bermuara pada pemanasan global (*Global Warming*). Pengembangan peternakan melalui pola miniranch yang terdiri dari 130 ekor sapi (50 ekor induk dan 80 ekor anak sapi) hanya menghasilkan 80 ton Carbon. Sedangkan dalam area miniranch (padang penggembalaan) 150 Ha dapat mengurangi gas Carbon sebesar 500 ton, sehingga miniranch tidak menghasilkan gas methane, namun bisa mengurangi polusi gas methane sebesar 420 ton.

Biogas memberikan perlawanan terhadap efek rumah kaca melalui 3 cara. *Pertama*, Biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk penerangan, kelistrikan, memasak dan pemanasan. *Kedua*, metana (CH₄) yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO₂. Pembakaran metana pada Biogas mengubahnya menjadi CO₂ sehingga mengurangi jumlah metana di udara. *Ketiga*, dengan lestarnya hutan, maka CO₂ yang ada di udara akan diserap oleh hutan yang menghasilkan oksigen yang melawan efek rumah kaca.

Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal. Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak. Pemerintah daerah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

Dalam hal ini yang tercakup dalam hal tersebut yang berkaitan dengan pemerintah daerah dengan tujuan, target dan indikator yang terkait dengan upaya pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pertanian dalam arti luas meliputi;

- Pada tahun 2030, MENGAKHIRI KELAPARAN dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun
- pada tahun 2030, MENGAKHIRI SEGALA BENTUK MALNUTRISI, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula
- pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan PRODUSEN MAKANAN BERSKALA MIKRO, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui AKSES YANG TERJAMIN DAN SETARA terhadap tanah, sumberdaya produksi lainnya, PENGETAHUAN, layanan finansial, PASAR dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian.

Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Disnak Keswan dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.11. Matriks TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan Global	Sasaran Global	Indikator
1. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta ,meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment).

Sumber: Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Untuk itu perlu mengenal kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui peluang dan ancaman, dengan menggunakan pendekatan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu:

1. Kekuatan (Strength)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, antara lain:

- 1). Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016.
- 2). Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/pd.300/8/2014
- 3). Tersedianya lahan eks tambang yang telah direklamasi dan revegetasi
- 4). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengendalian pemotongan betina produktif.

2. Kelemahan (Weakness)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur masih dijumpai beberapa kelemahan internal baik di dalam kelembagaan dinas maupun secara teknis di lapangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kelemahan yang dapat ditekan seminimal mungkin, antara lain :

- 1). Populasi dan Produktivitas Ternak masih rendah.
- 2). Produksi dan Pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal.
- 3). Cakupan pelaksanaan vaksinasi dan pemberantasan penyakit hewan menular (PHM) belum maksimal
- 4). Cakupan pelayanan Laboratorium belum optimal.
- 5). Produksi Lokal daging sapi dan telur masih rendah.

3. Peluang (Opportunity)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membuat strategi dan kebijakan pembangunan peternakan, antara lain :

- 1). Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan (daging, telur, dan susu) yang ASUH.
- 2). Daya tampung ternak masih tinggi
- 3). Program kemandirian dan kedaulatan pangan.
- 4). Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna.
- 5). Fasilitas Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

4. Ancaman (Threats)

Di samping peluang yang ada, faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi pembangunan peternakan juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan lima tahun ke depan, diantaranya :

- 1). Lalu lintas hewan/ ternak dan produk peternakan.
- 2). Kejadian/ kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)
- 3). Tingginya pemotongan Sapi Betina Produktif.
- 4). Angka kematian pedet tinggi.
- 5). Peran swasta masih rendah.
- 6). Daya saing produk masih rendah.

Adapun analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel.3.12. Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

FAKTOR	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<p style="text-align: center;">Eksternal Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Keswan berdiri sendiri. 2. Permentan tentang integrasi sapi dan sawit 3. Tersedianya lahan eks tambang 4. Regulasi Pemerintah Provinsi tentang pengendalian pematangan betina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah 2. Produksi dan Pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal 3. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal 4. Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet belum optimal 5. Produksi lokal daging Sapi dan telur masih rendah
Opportunity (Peluang)	Strategi S - O	Strategi W - O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan (daging, telur dan susu) yang ASUH 2. Daya tampung ternak masih tinggi 3. Program kemandirian dan kedaulatan pangan 4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna 5. Fasilitas Kredit Ternak Sajahtera (KTS) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) melalui jaminan keamanan pangan asal ternak 2. Peningkatan skala usaha peternakan melalui peningkatan akses KTS, AUTS dan Integrasi Sapi Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui penerapan teknologi peternakan dan penyebaran ternak indukan/bibit - Peningkatan ketersediaan bibit ternak berkualitas melalui pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) - Peningkatan pelayanan Laboratorium melalui optimalisasi surveilans
Threath (Ancaman)	Strategi S - T	Strategi W - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lalu lintas Hewan/Ternak dan Produk Peternakan 2. Kejadian/kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 3. Tingginya pematangan Sapi Betina Produktif 4. Angka kematian pedet tinggi 5. Peran swasta masih rendah 6. Daya saing produk masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat melalui pengembangan mini ranch di lahan eks tambang dan integrasi sapi sawit 2. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan, promosi dan pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan status keswan melalui pengaturan lalu lintas ternak/hewan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular dan peningkatan pelayanan keswan 2. Peningkatan produksi lokal daging sapi dan telur melalui pemberdayaan usaha ayam buras/ras dan penindakan pematangan sapi betina produktif

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh 7 (tujuh) kunci keberhasilan yang merupakan faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan, yaitu :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak
3. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil bibit/ benih ternak dan hijauan pakan ternak
4. Peningkatan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas hewan/ ternak
5. Peningkatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet
6. Peningkatan daya saing produk peternakan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru, sesuai hasil analisis SWOT yang dijabarkan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur harus mempunyai Motto sebagai cara pandang jauh ke depan terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Motto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Mini Ranch Sapi Potong untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat”

Motto tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yakni: 1) pengembangan *mini ranch*; dan 2) kesejahteraan peternak

Mini ranch, berarti model pemeliharaan ternak sapi dengan melakukan inovasi padang penggembalaan skala kecil.

Kesejahteraan peternak, berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual peternak dari usahanya beternak sapi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebagaimana untuk mewujudkan Motto tersebut dan sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 terkait dengan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

Misi kedua, yaitu “**Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**”

maka misi kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan pengembangan peternakan sapi potong di lahan eks tambang dan integrasi dengan tanaman merupakan upaya dalam meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur melalui pengembangan *mini ranch* untuk penyediaan daging yang berdaulat.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019 – 2023 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah”.

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah

Indikator :

Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)

Pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai penyedia protein hewani, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan output dan pendapatan dengan

memanfaatkan beberapa hasil dari produk-produk peternakan seperti biogas, pupuk, dan produk-produk hewani (daging, telur, susu).

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur.

Tabel 4.1. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1	S a p i	95.085	101.743	110.097	118.712	119.123
2	Sapi Perah	48	77	79	97	107
3	Kerbau	5.513	5.908	6.680	7.144	7.055
4	Kambing	50.072	55.259	59.258	57.794	61.526
5	Domba	229	239	265	320	281
6	Babi	61.478	64.214	68.238	75.475	85.749
7	Kuda	47	57	107	101	91
8	Ayam Buras	5.616.679	4.287.075	4.561.377	4.768.534	5.418.086
9	Ayam Petelur	1.195.743	686.278	966.432	842.176	822.533
10	Ayam Pedaging	43.802.742	46.553.307	55.783.230	60.747.455	66.268.201
11	Itik	153.107	198.371	192.883	192.505	219.149
12	Kelinci	9.413	12.672	11.776	13.063	15.005
13	Puyuh	7.500	52.511	62.669	68.643	46.693
14	Merpati	1.194	3.687	4.312	4.182	4.163
15	Itik Manila	3.707	19.408	24.114	25.215	35.934

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2018

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan itik manila) serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Dari tabel 6 terlihat bahwa jumlah populasi ternak besar sejak tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan. Demikian juga untuk populasi ternak kecil mengalami

peningkatan. Untuk ternak unggas mengalami peningkatan populasi kecuali ayam petelur, sedangkan semua aneka ternak mengalami peningkatan.

Tabel 4.2. Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1	S a p i	54.500	55.781	57.787	51.462	50.743
2	Sapi Perah	4	-	5	2	-
3	Kerbau	259	331	188	234	301
4	Kuda	34	15	9	6	10
5	Kambing	37.562	41.754	32.693	37.350	46.228
6	Domba	263	144	90	72	75
7	Babi	19.951	22.572	15.720	14.547	14.469
8	Ayam Buras	7.618.332	6.430.613	6.842.066	7.152.801	8.127.129
9	Ayam Petelur	777.175	343.139	483.216	421.088	411.267
10	Ayam Pedaging	40.581.988	42.372.976	52.088.785	54.672.710	59.641.381
11	Itik	75.084	99.186	96.442	96.253	109.575
12	Kelinci	1.360	1.896	8.832	9.797	11.254
13	Puyuh	4.872	47.260	56.402	61.779	42.024
14	Merpati	365	4.609	5.390	5.228	5.204
15	Itik Manila	355	11.645	14.468	15.129	21.560

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2018

Pada tabel 7, terlihat bahwa pemotongan terbanyak pada ayam pedaging dengan jumlah pemotongan mencapai 59.641.381 ekor. Bila dibandingkan tahun 2013, pemotongan ternak yang mengalami peningkatan terdapat pada kerbau, kambing, ayam buras, ayam pedaging, itik, kelinci, puyuh, merpati dan itik manila. Sedangkan pemotongan ternak yang mengalami penurunan adalah sapi, sapi perah, babi, kuda, ayam petelur dan babi.

Tabel 4.3. Perkembangan harga komoditas ternak dan produk ternak tahun 2013-2017

No.	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	Kg/BH	31.200	32.000	32.000	44.000	45.000
2	Kambing	Kg/BH	34.700	35.000	45.000	50.000	50.000
3	Ayam Kampung	Ekor	101.110	103.000	97.800	88.240	88.100
4	Ayam Broiler	Ekor	33.000	37.000	33.435	36.500	35.400
5	Telur Ayam Ras	Butir	975	1.200	1.350	1.580	1.600
6	Telur Ayam Kampung	Butir	2.095	2.170	2.170	2.400	2.450
7	Telur Itik	Butir	2.370	2.400	2.650	2.745	2.800
8	Daging Sapi	Kg	120.000	121.110	132.600	127.820	129.000
9	Daging Kambing	Kg	110.000	131.000	124.800	141.875	143.125

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2018

Dari tabel 8, terlihat bahwa harga semua komoditas mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Hanya ayam kampung yang mengalami penurunan. Pertumbuhan perekonomian subsektor peternakan masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya pada industri unggas penyediaan pakan masih tergantung dari luar Kaltim. Pada industri ruminansia besar, masih mengandalkan usaha peternakan rakyat yang belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan pengelolaan pakan belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan lalu lintas ternak kurang terkendali berpeluang menyebarkan penyakit hewan dan tidak terjamin kualitas serta keamanan produk.

Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi kesenjangan ketersediaan dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari luar Kaltim. Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi untuk memenuhi pasar luar Kaltim dengan penambahan sarana Rumah Potong Unggas (RPU). Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB subsektor peternakan diantaranya adalah populasi ternak, jumlah pemotongan ternak, pemasukkan dan pengeluaran ternak serta harga komoditas produk peternakan.

Tabel 4.3. PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	Sektor Pertanian					
	- Tanaman Pangan	1.118,19	1.189,25	1.233,98	990,44	1.111,17

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	- Tanaman Hortikultura	1.374,41	1.474,27	1.679,43	1.821,93	1.932,92
	- Tanaman Perkebunan	13.443,07	19.775,59	20.087,35	22.548,05	26.620,72
	- Peternakan	1.300,89	1.345,40	1.488,95	1.608,38	1.793,64
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	194,50	219,58	213,08	232,87	251,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel 4.4. Kontribusi PDRB Peternakan terhadap Perekonomian Prov Kaltim atas dasar harga berlaku Tahun 2013-2017 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	Sektor Pertanian					
	- Tanaman Pangan	0,22	0,23	0,24	0,19	0,19
	- Tanaman Hortikultura	0,26	0,28	0,33	0,36	0,33
	- Tanaman Perkebunan	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49
	- Peternakan	0,25	0,26	0,29	0,32	0,30
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel 4.5. Kontribusi PDRB Subsektor peternakan terhadap PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku Tahun 2013-2017 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	Sektor Pertanian					
	- Tanaman Pangan	3,81	3,22	3,17	2,37	2,36
	- Tanaman Hortikultura	4,68	3,99	4,31	4,35	4,10
	- Tanaman Perkebunan	45,80	53,52	51,53	53,89	56,46
	- Peternakan	4,43	3,64	3,82	3,84	3,80
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	0,66	0,59	0,55	0,56	0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Perkembangan subsektor peternakan pada tiap tahunnya hampir berada pada angka yang sama dimana rata-rata kontribusi yang diberikan pada peningkatan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,28 persen tiap tahun. Untuk kontribusi terbesarnya ada di tahun 2016 yaitu sebesar 0,32 persen sementara untuk kontribusi terendah ada di tahun 2013 yang memberikan kontribusi sebesar 0,25 persen.

Sedangkan rata-rata kontribusi yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 3,91% tiap tahun. Untuk kontribusi terbesar ada di tahun 2013 yaitu sebesar 4,43%, sementara untuk kontribusi terendah ada di tahun 2014 yang memberikan kontribusi sebesar 3,64%.

Adapun target PDRB subsektor peternakan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Target PDRB Subsektor Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam persen)

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)</u>	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023 adalah (1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; dan (2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

Perkembangan subsektor peternakan pada tiap tahunnya hampir berada pada angka yang sama dimana rata-rata kontribusi yang diberikan pada peningkatan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,28 persen tiap tahun. Untuk kontribusi terbesarnya ada di tahun 2016 yaitu sebesar 0,32 persen sementara untuk kontribusi terendah ada di tahun 2013 yang memberikan kontribusi sebesar 0,25 persen.

Sedangkan rata-rata kontribusi yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 3,91% tiap tahun. Untuk kontribusi terbesar ada di tahun 2013 yaitu sebesar 4,43%, sementara untuk kontribusi terendah ada di tahun 2014 yang memberikan kontribusi sebesar 3,64%.

Adapun target PDRB subsektor peternakan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Target PDRB Subsektor Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam persen)

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)</u>	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023 adalah (1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; dan (2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

Masing-masing sasaran tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. *“Meningkatnya produksi pangan asal hewan”*

Indikator :

1. *Produksi Daging*

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Peningkatan produksi daging ini tidak terlepas dari peningkatan populasi komoditas tersebut yang berasal dari lokal/dalam Kaltim.

Tabel 4.7. Target Produksi Daging di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Produksi Daging</u>	82.811,6	85.479,7	88.255,6	91.142,7	94.144,5

2. *Produksi Telur*

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun target produksi telur selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.8. Target Produksi Telur di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Produksi Telur</u>	11.786,1	12.058,6	12.337,7	12.623,6	12.916,3

Sasaran 2. *Meningkatnya kesejahteraan peternak*

Indikator :

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Pada bulan Desember 2017, NTP Peternakan dengan indeks 106,30. Sementara itu, untuk NTP subsektor lain indeksnya masih di bawah 100 poin, kecuali NTP Perikanan 103,24. NTP Tanaman Pangan 94,81, NTP Hortikultura 92,14, dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat 94,94. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli petani peternakan masih lebih tinggi ketimbang daya beli petani subsektor lainnya. NTP Peternakan dan NTP keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9. NTP Peternakan dan NTP Gabungan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Bulan	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		NTPT	NTP	NTPT	NTP	NTPT	NTP	NTPT	NTP
1	Januari	103,30	98,73	101,61	99,33	106,29	97,46	103,01	98,40
2	Februari	104,53	99,55	102,90	100,78	105,67	97,60	104,53	98,99
3	Maret	104,46	99,71	101,87	99,73	104,68	97,46	104,47	98,25
4	April	103,66	100,30	101,54	98,68	104,84	98,02	103,02	97,21
5	Mei	103,63	99,70	102,19	98,66	105,62	98,27	101,31	96,30
6	Juni	104,58	99,77	102,11	97,66	104,85	98,50	102,89	96,29
7	Juli	105,24	99,71	102,19	97,94	104,52	98,16	104,08	96,20
8	Agustus	104,23	100,11	101,27	98,50	103,12	98,14	104,56	96,61
9	September	104,41	101,12	102,98	98,54	104,35	98,64	104,45	96,17
10	Oktober	103,90	100,80	104,14	98,24	105,52	98,37	103,20	96,75
11	November	103,33	100,25	104,66	98,02	104,22	98,49	104,72	97,43
12	Desember	103,02	99,33	105,87	97,31	103,76	98,56	106,30	97,28
	Rata-Rata	104,02	99,92	102,78	98,62	104,79	98,14	103,88	97,16

Keterangan : NTPT = NTP Peternakan

NTP = NTP Pertanian

Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan, semakin baik daya jual peternak terhadap produk-produk peternakan dibanding daya beli peternak terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan biaya rumah tangga dan secara relatif lebih sejahtera. Adapun Target NTP Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	NTP Peternakan	104	104,5	104,5	105	105

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke					
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	
			1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	104,5	105	105
			2. Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Produksi daging (ton)	82.811,60	85.479,70	88.255,60	91.142,70	94.144,50
				2. Produksi telur (ton)	11.786,10	12.058,60	12.337,70	12.623,60	12.916,30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih;
4. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
5. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet;
6. Peningkatan daya saing produk peternakan
7. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;
8. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian.
9. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Arah kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch);
2. Perlindungan Kawasan Usaha Peternakan;
3. Peningkatan informasi dan akurasi data peternakan;
4. Fasilitasi pembiayaan;
5. Peningkatan usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam buras;
6. Upaya khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB);
7. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas;
8. Peningkatan pengawasan usaha budidaya perunggasan
9. Penerapan teknologi peternakan;
10. Penyebaran ternak indukan/ bibit;
11. Peningkatan penyebarluasan informasi program pembangunan peternakan kepada peternak;
12. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH);
13. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
14. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen;
15. Penguatan dan pemberdayaan Check Point;
16. Peningkatan pengawasan distributor obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan
Peningkatan surveilans penyakit hewan dan produk asal hewan;
17. Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan;
18. Peningkatan surveilans dan pengujian produk asal hewan;
19. Pengembangan usaha olahan produk peternakan;
20. Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan;
21. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penindakan pemotongan betina produktif;
22. Peningkatan pengawasan pangan asal ternak;
23. Peningkatan kedisiplinan, pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi perkantoran;
24. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
25. Peningkatan penyerapan anggaran secara efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta pencatatan aset yang transparan;
26. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran melalui tahapan program prioritas.

Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim :				
"Terwujudnya Pengembangan 1.000 Mini Ranch untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat"				
Misi Kedua :				
"Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan".				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat	1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch)
				2. Perlindungan Kawasan Usaha Peternakan
				3. Peningkatan informasi dan akurasi data peternakan
				4. Peningkatan akses pembiayaan peternak
				5. Peningkatan usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam buras
		2. Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak	1. Upaya khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB)
				2. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas
				3. Peningkatan pengawasan usaha budidaya perunggasan.
				4. Penerapan teknologi peternakan
				5. Penyebaran ternak indukan/ bibit
2. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih	2. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih	1. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH)		
		2. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)		

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			3. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak	1. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen 2. Penguatan dan pemberdayaan Check Point 3. Peningkatan pengawasan distributor obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan
			4. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	1. Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan 2. Peningkatan surveilans dan pengujian produk asal hewan
			5. Peningkatan daya saing produk peternakan	1. Pengembangan usaha olahan produk peternakan 2. Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan 3. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penindakan pemotongan betina produktif 4. Peningkatan pengawasan pangan asal ternak
			6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja	1. Peningkatan kedisiplinan, pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi perkantoran 2. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
			7. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian	Peningkatan penyerapan anggaran secara efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta pencatatan aset yang transparan.
			8. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran melalui tahapan program prioritas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional serta dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan

Program dan kegiatan tahun 2019-2023 sebagaimana dalam uraian berikut ini.

1. Program Kesekretariatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Program Pembangunan Peternakan

- a Program Hilirisasi Produk Peternakan
- b Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- c Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan.
- d Program Pengembangan Usaha Peternakan
- e Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet
- f Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2023 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan :

- 1.1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan :

- 2.1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 2.2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi Kegiatan :

- 3.1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
- 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi Kegiatan :

- 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- 4.2 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

5. Program Hilirisasi Produk Peternakan, meliputi kegiatan :

- 5.1. Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan
- 5.2. Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
- 5.3. Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak

6. Program Pengembangan Usaha Peternakan, meliputi kegiatan:

- 6.1. Pengembangan Kawasan Peternakan
- 6.2. Pengembangan Informasi Peternakan
- 6.3. Pengembangan Agribisnis Peternakan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, meliputi kegiatan :

- 7.1. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 7.2. Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas Hewan
- 7.3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan

8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan, meliputi kegiatan :

- 8.1. Pengembangan Perbibitan Ternak
- 8.2. Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
- 8.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagan Peternak

9. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet, meliputi kegiatan

- 9.1. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
- 9.2. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

10. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

- 10.1. Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak
- 10.2. Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak

Dari semua program tersebut diatas maka ditetapkan, Program Prioritas yang langsung mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan, yaitu**
 - Kegiatan** Pengembangan Perbibitan Ternak
 - Kegiatan** Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
 - Kegiatan** Peningkatan Kapasitas Kelembagan Peternak
- 2. Program Pengembangan Usaha Peternakan, yaitu**
 - Kegiatan** Pengembangan Kawasan Peternakan.
 - Kegiatan** Pengembangan Informasi Peternakan
 - Kegiatan** Pengembangan Agribisnis Peternakan

Adapun rencana program, kegiatan, kerangka pendanaan serta indikator kinerja tahun 2019– 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 6.1, 6.2 dan 6.3.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah				1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,33	0,33		0,34		0,35		0,36		0,37		0,37		Kepala Dinas PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Meningkatnya kesejahteraan peternak				Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	109,28	104		104,5		104,5		105		105		105		Kepala Dinas		
		3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan		Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Nilai Konstanta	123,10	118	5.800.000.000	118,5	10.250.000.000	118,5	11.670.000.000	119	7.400.000.000	119	7.600.000.000	119	42.720.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan		
					Jumlah Miniranch yang terregister (unit)	Miniranch	0	5		35		40		35		35		150				
		3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan		Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	Stek/Pols	0	100.000	5.180.000.000	100.000	9.000.000.000	100.000	10.470.000.000	100.000	6.000.000.000	100.000	6.000.000.000	500.000	36.650.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	
		3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan		Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	Dokumen	4	4	320.000.000	4	750.000.000	4	600.000.000	4	700.000.000	4	800.000.000	4	3.170.000.000	Kepala Seksi Data dan Informasi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	
		3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan		Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	Orang	60	50	300.000.000	50	500.000.000	55	600.000.000	60	700.000.000	65	800.000.000	65	2.900.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak				Produksi daging (ton)	Ton	80.248,29	82.811,60		85.479,70		88.255,60		91.142,70		94.144,50		94.144,50		Kepala Dinas		
					Produksi telur (ton)	Ton	11.519,95	11.786,10		12.058,60		12.337,70		12.623,60		12.916,30		12.916,30				
		3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan		Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	10	10	840.468.030	11	1.250.000.030	12	950.000.030	13	1.050.000.030	14	1.150.000.030	14	5.240.468.150	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet		
		3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan		Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	Unit usaha	2	2	230.768.000	2	500.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	10	1.780.768.000	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm,	
		3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan		Jumlah omset pemasaran produk dalam pameran/bazar	Rp	100.000.000	125.000.000	609.700.000	150.000.000	750.000.000	175.000.000	650.000.000	200.000.000	700.000.000	225.000.000	750.000.000	875.000.000	3.459.700.000	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	
		3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak		Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	30	30	272.000.000	30	950.000.000	30	350.000.000	30	400.000.000	30	450.000.000	30	150	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr,	
		3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan		Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana (unit)	Unit	0	5	1.115.150.000	35	2.600.000.000	40	2.450.000.000	35	2.600.000.000	35	2.750.000.000	150	11.515.150.000	Kepala Bidang Kesehatan Hewan		
		3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan		Jumlah hewan yang divaksinasi	Ekor	30.000	10.000	491.700.000	10.000	750.000.000	10.000	550.000.000	10.000	600.000.000	10.000	650.000.000	50.000	3.041.700.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					A. Dinas	M2	4.427	4.427		4.427		4.427		4.427		4.427		4.427				
		Meningkatnya transparansi pelaksanaan anggaran			Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		Kepala Dinas		
		3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		10	11	1.480.196.000	12	1.830.000.000	13	1.710.000.000	14	1.790.000.000	15	1.870.000.000	15	8.680.196.000	Sekretaris Dinas		
		3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi					1.215.996.000		1.500.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		7.065.996.000	Kepala Subbagian Umum	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr,	
				A. Dinas	Kegiatan		191	149			160		164		168		170		170			
		3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek					264.200.000		330.000.000		310.000.000		340.000.000		370.000.000		1.614.200.000	Kepala Subbagian Umum	ppu, smd, luarPrv	
				A. Dinas	Orang		0	14			16		18		20		22		90			
		Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja			Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	1,3	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		2,5		Kepala Dinas		
		3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai		77,86	78,36	1.075.000.000	78,86	1.700.000.000	79,36	1.300.000.000	79,86	1.400.000.000	80,36	1.500.000.000	80,36	6.975.000.000	Sekretaris Dinas		
		3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen		10	12	645.000.000	12	950.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000	12	3.995.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan Program	smd, luar Prov	
		3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan		16	17	430.000.000	17	750.000.000	17	550.000.000	17	600.000.000	17	650.000.000	17	2.980.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan Program	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	
		TOTAL ANGGARAN (Rp)								21.495.292.844		48.980.000.030		31.650.000.030		28.540.000.030		30.000.000.030		160.665.292.964		

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah				1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,33	0,33		0,34		0,35		0,36		0,37		0,37		KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak				Produksi daging (ton)	Ton	80.248,29	82.811,60		85.479,70		88.255,60		91.142,70		94.144,50		94.144,50		Kepala Dinas	
					Produksi telur (ton)	Ton	11.519,95	11.786,10		12.058,60		12.337,70		12.623,60		12.916,30		12.916,30			
			3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)	%	11	11	896.890.000	12	2.615.000.000	13	3.300.000.000	14	1.500.000.000	15	1.700.000.000	15	10.011.890.000	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
			3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan	Sampel	5450	4240	360.172.400	4722	1.100.000.000	5224	1.600.000.000	5828	700.000.000	7250	800.000.000	27.264	4.560.172.400	Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr,
			3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	Sampel	460	660	336.717.600	733	1.415.000.000	851	1.600.000.000	935	700.000.000	1200	800.000.000	4.379	4.851.717.600	Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.92.03	Pembangunan/ Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	600.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT api-api	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
	Meningkatnya kondisi kenyamanan lingkungan kantor				Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Kepala Dinas	
			3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	%	80	80	764.738.554	81	870.000.000	82	900.000.000	83	1.100.000.000	84	1.200.000.000	84	4.834.738.554	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	
			3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses			764.738.554		870.000.000		900.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.834.738.554	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan	smd	
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Surat	75	210		240		270		300		330		330			
			3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	0	3	192.471.446	3	1.622.000.000	3	460.000.000	3	470.000.000	3	475.000.000	3	3.219.471.446	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan			29.000.000		1.220.000.000		160.000.000		170.000.000		175.000.000		1.754.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan	smd		
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	0	4	11	8	6	6	6	6	6							
			3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki			163.471.446		402.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.465.471.446	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan	smd		
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	25	45	49	49	49	49	49	49	49							
					Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihan																	
			B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	M2	686	686	686	686	686	686	686	686	686									
			Meningkatnya transparansi pelaksanaan anggaran	Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Kepala Dinas					
			3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	10	11	218.000.000	12	385.000.000	13	340.000.000	14	375.000.000	15	385.000.000	15	1.703.000.000	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet		
			3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi			181.000.000		300.000.000		260.000.000		285.000.000		285.000.000		1.311.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan	bri, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, luarPrv		
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Kegiatan	13	27	36	47	51	51	51	51								
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek			37.000.000		85.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		392.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan	ppu, smd, luarPrv					
		B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Orang	0	1	6	7	8	10	32												
TOTAL ANGGARAN (Rp)										2.072.100.000		5.492.000.000		5.000.000.000		3.445.000.000		3.760.000.000		19.769.100.000		

Tabel 6.3
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah				1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,33	0,33		0,34		0,35		0,36		0,37		0,37		Kepala Dinas PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak				Produksi daging (ton)	Ton	80.248,29	82.811,60		85.479,70		88.255,60		91.142,70		94.144,50		94.144,50		Kepala Dinas	
					Produksi telur (ton)	Ton	11.519,95	11.786,10		12.058,60		12.337,70		12.623,60		12.916,30		12.916,30			
			3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	%	10,00	10	5.878.254.000	11	3.100.000.000	12	2.300.000.000	13	1.700.000.000	14	1.900.000.000	14	14.878.254.000	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	
			3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit	Ekor	31	40	278.604.000	40	1.250.000.000	40	650.000.000	40	600.000.000	40	700.000.000	200	2.678.604.000	Kepala seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	ppu, smd, luarPrv
			3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	Ton	700	700	641.600.000	750	850.000.000	750	650.000.000	800	900.000.000	800	1.000.000.000	3.800	3.391.600.000	Kepala Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	ppu, smd, luarPrv
			3.03.92.03	Pembangunan/ Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung	Unit	0	7	4.958.050.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	7.358.050.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT api-api	ppu, smd, luarPrv
	Meningkatnya kondisi kenyamanan lingkungan kantor				Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	80,00	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		84,00		Kepala Dinas	
			3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	%	80	80	989.233.186	81	1.200.000.000	82	1.200.000.000	83	1.300.000.000	84	1.500.000.000	84	6.189.233.186	Kepala UPTD PTHPT Api-api	
			3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses				989.233.186		1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000		6.189.233.186	Kepala UPTD PTHPT Api-api	ppu, smd
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Surat	200	250		250		250		250		250		250			
			3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	0	3	1.193.400.000	3	2.160.000.000	3	1.960.000.000	3	1.580.000.000	3	1.590.000.000	3	8.483.400.000	Kepala UPTD PTHPT Api-api	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANIAN
BIDANG PETERNAKAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (RPJMD) Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (tahun 2023)
			1 (Thn 2019)	2 (Thn 2020)	3 (Thn 2021)	4 (Thn 2022)	5 (Thn 2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengembangan Usaha Peternakan							
	1. Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	123,10 Nilai Konstanta	118	118,5	118,5	119	119	119
	2. Jumlah Miniranch yang beroperasi	0 Unit	5	35	40	35	35	150
	Kegiatan:							
	1. Pengembangan Kawasan Peternakan							
	Jumlah Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	0 Steks/Pols	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	2. Pengembangan Informasi Peternakan							
	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data Fungsi	4 Dokumen	4	4	4	4	4	4
	3. Pengembangan Agribisnis							
	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	60 Orang	50	50	55	60	65	65

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (RPJMD) Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (tahun 2023)
			1 (Thn 2019)	2 (Thn 2020)	3 (Thn 2021)	4 (Thn 2022)	5 (Thn 2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan							
	1. Angka Kelahiran Sapi	19 %	20	20	20,5	21	22	22
	2. Calving Interval	19 Bulan	18	18	17	17	16	16
	Kegiatan:							
	1. Pengembangan Perbibitan Ternak							
	1. Jumlah Ternak Sapi Bibit yang Memiliki Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)	50 Ekor	100	100	120	140	150	610
	2. Service/Conception (S/C)	2,09 Nilai	1,8	1,75	1,7	1,65	1,6	1,6
	2. Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna							
	Jumlah Kelompok Budidaya yang dilakukan Pendampingan	1 Kelompok	1	1	2	3	4	11
	3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan							
	Jumlah Proposal Permohonan Bantuan yang diVerifikasi	24 Proposal	12	14	16	18	20	80

Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) adalah Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi NTUP Bidang Peternakan diantaranya adalah biaya produksi, luas lahan peternak, harga jual usaha ternak dan lain-lain.

Mini Ranch adalah inovasi dari padang penggembalaan terbatas. Pola pemeliharaan dengan sistem Mini Ranch ini sesuai dengan potensi lahan yang ada yaitu lahan eks tambang dan kebun sawit, dengan sistem pemeliharaan secara ekstensif atau semi intensif dengan memanfaatkan potensi pakan setempat. Dengan Mini Ranch ini diharapkan dapat meningkatkan rata-rata kepemilikan ternak sapi 20 – 30 ekor per peternak.

Padang penggembalaan adalah suatu daerah padangan di mana tumbuh tanaman pakan ternak yang cukup tersedia bagi ternak. Fungsi padang penggembalaan untuk menyediakan bahan makanan bagi hewan yang paling murah karena itu harus dikelola secara baik. Produksi HPT sampai saat ini sebanyak 40.775 Ton (Tahun 2018).

Angka Kelahiran Pedet Tahun 2017 mencapai 19,04% dari populasi atau 22.634 ekor per tahun, diharapkan akan meningkat menjadi 22%. Namun permasalahan yang dihadapi adalah angka kematian pedet sebelum lepas sapih atau umur 4 bulan yang mencapai 15% dari angka Induk yang bunting melahirkan pada sapi-sapi yang dipelihara dengan pola ekstensif-semi intensif (70% sapi di Provinsi Kalimantan Timur dipelihara dengan pola ini) yakni sebesar 2.376 ekor, angka ini harus diturunkan menjadi 10-11% dengan peningkatan pengelolaan pemeliharaan pedet.

Calving Interval adalah jarak antara kelahiran dengan kelahiran berikutnya, idealnya 13 – 14 bulan, saat ini calving interval masih berada pada 18 bulan. Untuk itu diperlukan pengelolaan sistem perkawinan dan pengelolaan pakan secara baik dan benar.

Service per Conception (S/C) adalah jumlah pelayanan inseminasi (service) yang dilakukan sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi. S/C saat ini 1,8 indeks pada tahun 2023 ditargetkan tercapai S/C 1,2 indeks.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (5) tahun yang memuat visi, misi, strategi atau kebijakan umum, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Pada setiap tahun akan disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RENSTRA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD, sehingga tertuang dalam program dan kegiatan. Pendanaan setiap kegiatan akan terhitung secara rinci dan mengacu pada peraturan penganggaran yang dihimpun secara berjenjang melalui Musrenbang.

Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian **Kalimantan Timur yang Berdaulat**.

LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050.14/K.268/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 103).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan susunan personil dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim penyusun sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Mereview Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Menelaah Rencana Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. Menganalisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- g. Merumuskan isu-isu strategis;
- h. Merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah;
- i. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- j. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- k. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050.14/K.268/2019 TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

- Pembina : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim
- Ketua : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
- Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
- Anggota : 1. Kabid Ekonomi Bappeda Prov.Kaltim
2. Kasubbid Pertanian dan Perikanan Bappeda Prov.Kaltim
3. Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
4. Asisten Ahli Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
5. Kasubag. Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Prov kaltim
6. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha

Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Prov Kaltim

7. Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
8. Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim.
9. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Prov Kaltim.
10. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan
Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov
Kaltim.
11. Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
12. Kepala Seksi Kesmavet Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov Kaltim.
13. Drh. Yulis Tanty Medik Veteriner Ahli Muda Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
14. Rina Wardati, S.Pt Staf Perencanaan Program Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
15. Sahariminah Staf Perencanaan Program Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
16. Delsi Iswayati, SE Staf Perencanaan Program Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
17. Alif Muktalipun, A.Md Staf Subbagian Akuntabilitas
Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Kaltim
18. Yogi Gunara Ryana, SE Staf Perencanaan Program
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim
19. Guntur Sinatra Staf Subbagian Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Setda Prov Kaltim

19. Syamsul Bahri, S.Pt (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim)
 20. Hendy Darmawan, S.Pt (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim)
-

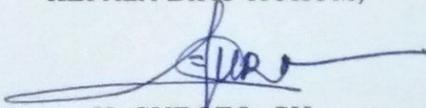
Samarinda, 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Dayanegara No. 16, Telp: (0541) 713801 - 7137745, Fax: (0541) 710220 - Samarinda, Indonesia,
Email: disapeternakan@timorprov.go.id

